

Chain Reaction Research merupakan koalisi yang terdiri dari Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers.

Kontak:

www.chainreactionresearch.com
info@chainreactionresearch.com

Penulis:

Sarah Drost, Aidenvironment
Ender Kaynar, Profundo
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari:
Auriane Germémont, Aidenvironment
Youki Mikami, Plantation Watch
Toyoyuki Kawakami, JATAN
Gerard Rijk, Profundo



Jepang: Pemodal dan Pembeli Besar Minyak Sawit dan Kayu Lapis yang Tidak Berkelanjutan

April 2021

Laporan ini membahas peran Jepang di pasar minyak sawit dan kayu dunia dengan melihat pada posisi negara tersebut sebagai pembeli dan pemodal minyak sawit dan kayu lapis yang tidak berkelanjutan.

Temuan Utama:

- **Jepang, sebagai pembeli besar minyak kelapa sawit dan produk kayu dari Indonesia dan Malaysia, menjadi pasar “leakage” untuk kedua komoditas tersebut.** Perusahaan dagang utama bernama ITOCHU, Mitsubishi, Mitsui & Co., Sojitz dan Sumitomo menjadi pembeli dan pemodal minyak sawit dan/atau kayu yang tidak berkelanjutan. Meskipun ITOCHU, Mitsui dan Mitsubishi melakukan pembelian berdasarkan NDPE, sampai saat ini tidak satupun yang jelas kepatuhannya. Pada tahun 2020, 4.538 hektar lahan dibuka di rantai pasokan minyak sawit ITOCHU.
- **Kebijakan biomassa Pemerintah Jepang menjadi insentif untuk impor minyak sawit dan produk kayu.** Meskipun permintaan produk sawit untuk konsumsi makanan masih relatif stabil, permintaan cangkang dan minyak sawit untuk pembangkit listrik telah meningkat seiring dengan program FIT Jepang.
- **Meskipun Olimpiade Tokyo 2021 telah mempromosikan kebijakan keberlanjutan dan mendorong keanggotaan RSPO, kebijakan pembelannya masih kurang memadai.** Impor minyak sawit bersertifikasi RSPO masih sedikit dan tercampur dengan volume yang tidak tersertifikasi. Korindo telah memasok kayu lapis yang berkaitan dengan deforestasi untuk pembangunan salah satu gedung Olimpiade melalui importir Jepang bernama Sumitomo Forestry.
- **Permintaan besar akan kayu lapis Indonesia di Jepang dikaitkan dengan deforestasi dan minyak sawit yang tidak berkelanjutan.** Sepuluh eksportir terbesar kayu lapis Indonesia ke Jepang membuka 15.340 ha lahan untuk perkebunan kelapa sawit dari tahun 2016-2020. Sojitz, Sumitomo dan ITOCHU menjadi penerima besarnya. Baru ITOCHU saja yang mempunyai kebijakan NDPE pada tingkat grup, namun anak perusahaannya ITOCHU Kenzai tetap menerima kayu lapis dari perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
- **Jepang adalah pemodal perkebunan kelapa sawit terbesar keempat setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura.** Lembaga keuangan Jepang menyediakan pembiayaan sebesar \$AS 6,2 miliar kepada sektor perkelapasawitan Asia Tenggara dari tahun 2013-2019, di mana 96 persennya disediakan oleh Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial dan SMBC Group.

Lembaga tersebut juga menyediakan 63 persen pembiayaan kepada perusahaan yang aktif di sektor kayu. Tidak satupun di antaranya yang mempunyai kebijakan risiko hutan yang memadai.

- **Perusahaan dagang Jepang Fuji Oil dan perusahaan hilir Kao Corporation terekspos risiko reputasi.** Fuji Oil terekspos pada 4.732 ha deforestasi dan pengembangan di lahan gambut di rantai pasokan minyak kelapa sawitnya pada tahun 2020, sedangkan Kao mencapai 9.523 ha. Fuji Oil dan Kao mengantisipasi penurunan nilai akibat risiko deforestasi masing-masing sebesar \$AS 1,6 miliar dan \$AS 60 juta berdasarkan valuasi pengganda nilai saat ini. Para pemodal dan investor dapat menyarankan pembiayaan lebih untuk kegiatan pengawasan/verifikasi dalam rangka menghindari hilangnya nilai reputasi Kao dan Fuji Oil.

Jepang berperan penting sebagai pengimpor dan pemodal minyak sawit dan kayu

Jepang, sebagai pembeli besar minyak kelapa sawit dan produk kayu dari Indonesia dan Malaysia, menjadi pasar *“leakage”* untuk kedua komoditas tersebut. Meskipun Jepang tidak menanam kelapa sawit, beberapa perusahaan dagang umum (*sogo shosha*) menjualbelikan dan membiayai berbagai macam produk, termasuk minyak sawit dan kayu. Lima *sogo shosha utama* di Jepang tercatat dalam laporan ini sebagai pembeli dan pemodal minyak sawit dan kayu *“leakage”* yang tidak berkelanjutan. Perusahaan tersebut adalah ITOCHU Corporation (*“ITOCHU”*), Mitsubishi Corporation (*“Mitsubishi”*), Mitsui & Co. (*“Mitsui”*), Sojitz Corporation (*“Sojitz”*) dan Sumitomo Corporation (*“Sumitomo”*).

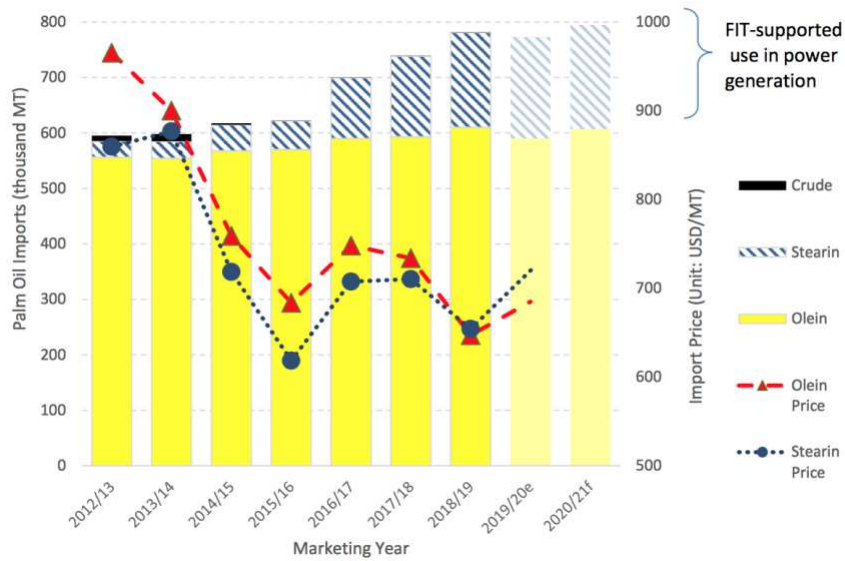
Impor minyak sawit untuk kebutuhan makanan dan pembangkit listrik tenaga biomassa terus tumbuh di Jepang

Jepang menjadi salah satu negara terbesar pengimpor minyak sawit dari wilayah Asia Timur, terutama untuk pengolahan makanan dan kebutuhan biomassa untuk instalasi pembangkit listrik. Pada tahun 2018/19, Jepang mengimpor 781.758 ton metrik (MT) minyak sawit, di mana 62 persen berasal dari Malaysia dan 38 persen dari Indonesia. 78 persen impor pada tahun 2018/19 (610.428 MT) merupakan minyak *palm olein* (minyak goreng sawit), terutama untuk kegiatan pengolahan makanan dan pembuatan bahan kimia; 22 persen (170.741 MT) merupakan minyak *palm stearin* (fraksi padat) untuk pembangkitan listrik dan digunakan di produk makanan (terutama margarin); sementara kurang dari 1 persen (589 MT) merupakan minyak sawit mentah.

Permintaan *palm olein*, yang didorong oleh konsumsi makanan, masih relatif stabil (lihat Gambar 1 di bawah). *Palm olein* di industri lain (15 persen) digunakan dalam pembuatan kimia menjadi sabun, detergen dan kosmetik. Untuk tahun 2020/21, estimasi total impor minyak sawit mencapai 795.000 MT. Selain itu, impor minyak inti kelapa sawit (MINYAK INTI KELAPA SAWIT) tetap stabil pada kisaran 72.000-80.000 MT selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan permintaan *palm stearin* kemungkinan akan semakin meningkat, yang terutama didorong oleh penggunaan biomassa dalam pembangkitan listrik sejak instalasi pembangkit listrik tenaga minyak sawit pertama mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2014.

Gambar 1: Impor tahunan palm olein, palm stearin dan minyak sawit mentah di Jepang

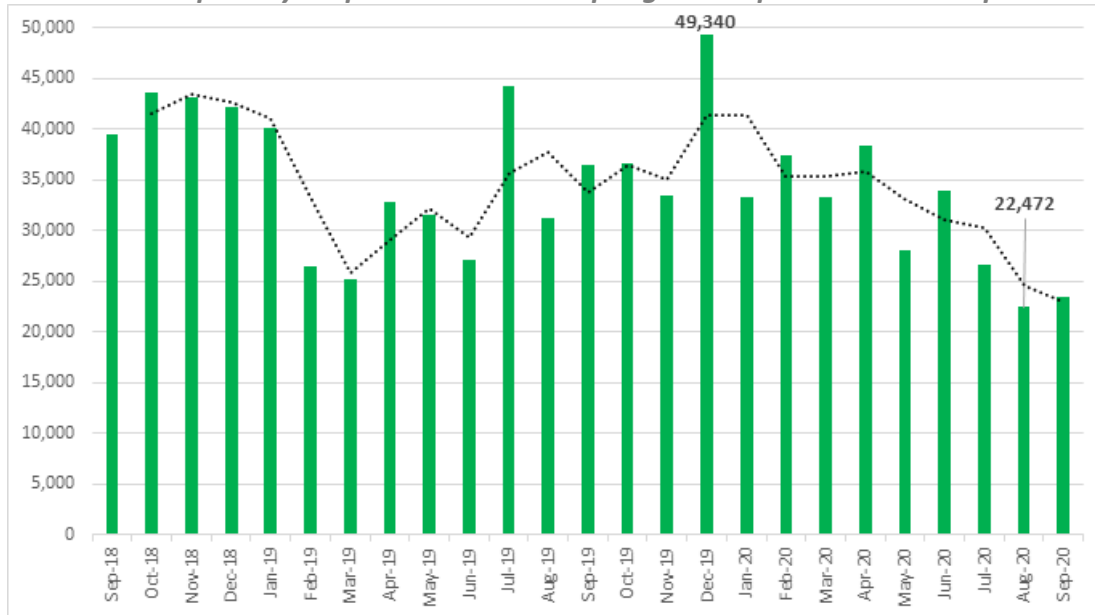


Sumber: Gambar diderivasi dari *Japan Oilseeds and Products Annual, April 2020*. FIT mengacu pada sistem 'feed-in tariff' (FIT), yaitu skema pendukung energi baru terbarukan dari Pemerintah Jepang.

Jepang adalah negara tujuan utama kayu lapis Indonesia, yang digunakan terutama di bidang konstruksi

Jepang adalah pembeli terbesar kayu lapis Indonesia. Sejak September 2018 sampai September 2020, 8,6 juta MT kayu lapis diekspor dari Indonesia ke Jepang. Selama periode tersebut, Jepang menjadi pembeli kayu lapis Indonesia terbesar dengan menerima 31 persen ekspor kayu lapis negara melalui impor dari 73 perusahaan. Ekspor kayu lapis rata-rata bulanan ke Jepang mencapai 34.393 MT, yang berkisar dari 22.472 MT pada Agustus 2020 sampai 49.340 MT pada bulan Desember 2019 (Gambar 2).

Gambar 2: Ekspor kayu lapis Indonesia ke Jepang dari September 2018-September 2020 (MT)



Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan tradedata.net.

Impor Jepang terhadap kayu lunak dan produk kayu olahan, termasuk kayu lapis, terlihat mengalami penurunan. [Data perdagangan](#) dan [analisis sektor](#) mengonfirmasi tren penurunan ini serta pergeseran yang terjadi di pasar kayu Jepang akhir-akhir ini. Faktor penyebab terbaru berkaitan dengan pandemi COVID-19, karena impor dan ekspor bahan baku terdampak oleh turunnya aktivitas perekonomian global. Secara lebih terstruktur, penurunan tersebut dikaitkan dengan permintaan yang berkurang di sektor konstruksi serta tumbuhnya produk kayu dalam negeri.

Di Jepang, kayu lapis digunakan secara luas untuk pembangunan rumah dan digunakan sebagai bahan lantai. Dengan menurunnya jumlah penduduk Jepang, maka ukuran unit rumah keluarga yang dibangun saat ini menjadi lebih kecil. Sebagai akibatnya, konsumen utama kayu lunak, yakni sektor konstruksi Jepang, mengurangi permintaannya akan kayu lapis dari luar negeri.

Jepang semakin mengandalkan produk kayu dalam negeri sejak awal tahun 2000an. Badan Kehutanan Jepang [menargetkan](#) peningkatan konsumsi kayu dalam negeri dari 30 juta m³ menjadi 40 juta m³ sebelum tahun 2025. Pertumbuhan produksi dalam negeri secara berangsur-angsur menggeser impor produk kayu dari Indonesia, Malaysia dan Tiongkok. Guna mendorong konsumsi kayu, dilatarbelakangi turunnya permintaan untuk pembangunan rumah, maka Pemerintah Jepang mempromosikan pasar baru untuk produk kayu lunak seperti bangunan bukan hunian dan gedung bertingkat tinggi. Tahun kemarin, Badan Kehutanan Jepang mengembangkan program pendukung senilai [\\$AS 22 juta](#) untuk memfasilitasi penggunaan kayu struktural dan produk kayu olahan dalam pembangunan gedung bertingkat.

Kebijakan biomassa Jepang menjadi insentif untuk impor minyak sawit dan produk kayu

Insentif dari Pemerintah Jepang atas penggunaan energi baru terbarukan telah mendorong pemanfaatan minyak sawit, cangkang sawit dan pelet kayu untuk pembangkitan listrik. Penggunaan minyak sawit sebagai sumber bahan bakar utama di instalasi pembangkit listrik [menuai kontroversi](#) karena keterkaitannya dengan deforestasi. Sejak tahun 2012, Jepang memberlakukan undang-undang *feed-in-tariff* (FIT), yaitu skema pendukung energi baru terbarukan yang menjamin bahwa listrik yang dibangkitkan dari energi baru terbarukan akan dibeli perusahaan listrik pada harga tetap (tarif). Pada tahun 2020, sistem FIT mempunyai insentif tertinggi di dunia untuk listrik biomassa, yaitu di kisaran 21-24 yen/kWh. Pada April 2022, Jepang berencana memperkenalkan skema *feed-in-premium* (FIP) untuk instalasi pembangkit listrik tenaga biomassa berskala besar, sambil mempertahankan sistem FIT untuk instalasi yang lebih kecil. Skema FIP bergantung pada pasar harga listrik, sedangkan FIT didasarkan pada harga listrik [tetap](#). Kedua skema tersebut akan terus mengandalkan biomassa, berlawanan dengan apa yang [diharapkan](#) sebelumnya.

Persyaratan Jepang yang mengharuskan minyak sawit dan produk turunannya yang digunakan di instalasi pembangkit listrik tenaga biomassa untuk bersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ditunda hingga April 2022. Awalnya, Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) merencanakan [persyaratan](#) tersebut di bawah sistem FIT dari bulan Maret 2019, namun [ditunda](#) sampai tahun 2021, setelah perundingan kerjasama bilateral antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 2019. Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar minyak inti kelapa sawit yang digunakan di instalasi pembangkit listrik tenaga biomassa di Jepang. Salah satu hasil perundingan adalah Jepang juga akan mengakui skema sertifikasi lain seperti sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Baru-baru ini, METI menangguhkan sertifikasi di bawah FIT untuk kedua kalinya sampai bulan [April 2022](#). Panduan dari METI mengenai pelaksanaan pada tahun 2022 [mensyaratkan](#) pengadaan minyak sawit

yang bersifat “*identity preserved*” (IP) atau “*segregation*” (SG), yang berarti minyak dapat terlacak dan tersertifikasi sampai basis pasokan.

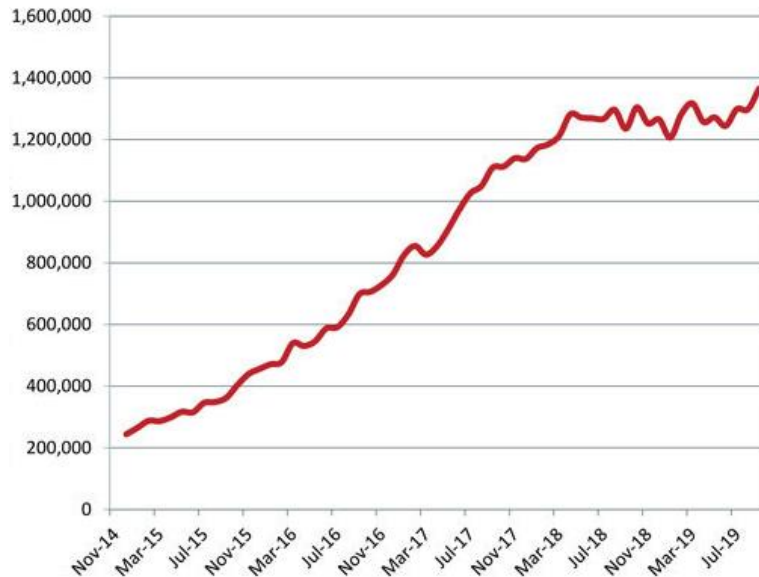
Sementara itu, selama tahun 2020, upaya bersama oleh masyarakat sipil dan keberatan oleh warga di Jepang berhasil menghentikan satu instalasi pembangkit listrik tenaga minyak sawit yang sudah ada dan satu lagi yang direncanakan. Proyek instalasi tenaga minyak sawit cair terbesar yang [dibatalkan](#) adalah pembangkit listrik berkapasitas 66-MW di Kota Maizuru, Prefektur Kyoto, Jepang. Menurut rencana, instalasi tersebut akan beroperasi selama 20 tahun dan menggunakan sekitar 120.000 MT minyak sawit setiap tahunnya. Pada bulan Mei 2019, Golden Agri-Resources (GAR) [melepaskan](#) seluruh sahamnya di Maizuru Green Initiatives GK, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan instalasi listrik tersebut. [Mundurinya](#) perusahaan terkemuka AMP Group dari proyek Maizuru Biodiesel Electric Power Plant berarti proyek tersebut akhirnya tidak dapat dilangsungkan. Setelah pembatalan instalasi pembangkit listrik tenaga minyak sawit tersebut, agen perjalanan H.I.S. di Miyagi dan Sankei Energy di Kyoto menjadi sasaran [kampanye](#) masyarakat sipil untuk menghentikan keterlibatannya dengan pembangkit listrik tenaga minyak sawit.

Kenaikan tajam impor cangkang sawit yang tidak bersertifikasi untuk kegiatan pembangkitan listrik

Jepang menjadi pengimpor besar cangkang sawit sejak produk sampingan minyak kelapa sawit tersebut **disahkan sebagai biomassa untuk sistem FIT pada tahun 2012**. Estimasi menunjukkan impor cangkang sawit dan sisa sawit lainnya sebesar [2,5 juta MT](#) pada tahun 2019, yang digunakan terutama sebagai bahan baku oleh instalasi pembangkit listrik tenaga biomassa berkapasitas sedang dan besar (di atas 20 MW) yang memenuhi persyaratan FIT. Sebaliknya, pada tahun fiskal 2014-2015, Jepang mengimpor [287.000 MT](#) cangkang sawit saja, yang memperlihatkan suatu peningkatan yang cukup signifikan (lihat Gambar 3) sejak instalasi pembangkit listrik tenaga biomassa pertama mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2014. Menurut perkiraan, impor cangkang sawit Jepang akan mencapai [5 juta MT](#) sebelum tahun 2025 akibat adanya peningkatan jumlah instalasi pembangkit listrik tenaga biomassa yang memerlukan “bahan baku yang handal dan murah”.

Sebagian besar cangkang sawit berasal dari Indonesia. [Menurut laporan](#), Indonesia mengekspor 1,1 juta MT cangkang sawit pada tahun 2018. Indonesia memenuhi sekitar [70 persen](#) permintaan cangkang sawit Jepang, sedangkan 30 persen berasal dari Malaysia. Cangkang sawit [dianggap](#) sebagai “bahan baku biomassa yang paling efektif biaya dari segi kandungan energi”.

Gambar 3: Kenaikan tajam impor cangkang sawit Jepang dari tahun 2014-2019 (MT)



Sumber: [Biomass Magazine](#), 2 Januari 2020

Perusahaan **importir** utama Jepang untuk impor cangkang sawit Indonesia dari bulan Juni sampai November 2020 adalah Hanwa, Erex, Toyota Tsusho Corporation, Sumitomo Forestry, ITOCHU Corporation dan Inabata (bagian dari Sumitomo Chemical). Tiga perusahaan terakhir dibahas di bagian lain laporan ini sebagai pelaku minyak sawit dan kayu “leakage”. Pada bulan Februari 2021, perusahaan Hanwa, yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo, menjadi perusahaan pertama yang menerima [Sertifikasi RSB FIT Jepang](#). Sertifikasi tersebut, yang berlaku untuk perusahaan yang memproduksi, mengadakan dan mengimpor biomassa di bawah sistem FIT Jepang, mengharuskan perusahaan untuk mengikuti 12 [prinsip keberlanjutan](#). Pada tahun 2019, Hanwa menyetujui [kontrak 15 tahun](#) bersama pemasoknya yang berbasis di Indonesia dan satu instalasi pembangkit listrik yang belum teridentifikasi. Berdasarkan [data pengiriman](#), satu-satunya perusahaan Indonesia yang terdaftar sebagai pemasok Hanwa adalah PT Jatim Propertindo Jaya. [Menurut laporan](#), perusahaan yang berbasis di Provinsi Riau tersebut menjadi eksportir nasional terbesar yang memasok [205.564 MT](#) cangkang sawit kepada Hanwa dari bulan Juni sampai November 2020. Selain itu, produsen energi baru terbarukan Erex [memperoleh](#) bahan bakar dari pemasok cangkang sawit Indonesia untuk instalasi pembangkit listriknya di Jepang: pembangkit Uruma berkapasitas 50-MW di Okinawa (direncanakan untuk bulan Juli 2021) dan pembangkit Sakaide berkapasitas 75-MW di Kagawa (direncanakan untuk tahun 2025-2026). Inabata & Co. adalah grup dagang khusus yang [berafiliasi](#) dengan Sumitomo Chemical.

Cangkang sawit adalah produk sampingan dari proses pengolahan inti sawit. Sampai saat ini, skema sertifikasi lingkungan hidup belum mencakup cangkang sawit. Dari bulan Juli 2018 sampai Juni 2019, baru seperlima cangkang sawit yang diproduksi di Indonesia dan Malaysia [dinilai](#) berasal dari perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO. Namun demikian, beberapa program sertifikasi global dan Eropa, seperti Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), dan Green Gold Label (GGL), telah mengindikasikan keinginannya untuk sertifikasi cangkang sawit.

Dalam waktu dekat, METI kemungkinan akan menganjurkan tindakan keberlanjutan yang lebih ketat, seperti mensyaratkan cangkang sawit tersertifikasi untuk FIT. Menanggapi hal tersebut, sepertinya impor bahan baku biomassa alternatif seperti [pelet kayu](#) akan meningkat, meskipun lebih mahal. Namun demikian, sertifikasi keberlanjutan cangkang sawit kemungkinan [sulit untuk diwujudkan](#) karena pelacakan produk limbah yang berasal dari berbagai pabrik kelapa sawit tidak mudah.

Olimpiade Tokyo mempercepat kinerja keberlanjutan di Jepang, namun kemungkinan “leakage” tetap ada

Jepang promosikan Olimpiade Tokyo sebagai Olimpiade Berkelanjutan

Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 telah menerapkan kebijakan **pembelian** berkelanjutan untuk **minyak sawit, kayu, kertas dan produk pertanian dan perikanan lainnya**. Standar pengadaan untuk minyak sawit **mensyaratkan** bahwa seluruh minyak sawit yang dibeli sudah bersertifikat dari salah satu skema sertifikasi berikut: RSPO, MSPO atau ISPO. Menurut **Kode Pembelian** untuk Promosi Minyak Sawit Berkelanjutan, “Selama ini, warga Jepang belum mencurahkan perhatian penuh pada keberlanjutan minyak kelapa sawit. Tokyo 2020, melalui peningkatan kesadaran antara para pelaku usaha dan konsumen berkat perumusan dan penerapan Kode Pembelian ini, bertujuan untuk ikut memperluas gerakan jangka panjang mengenai minyak sawit berkelanjutan, yang mewujudkan perbaikan di lokasi produksi minyak kelapa sawit.”

Para LSM **menyatakan** bahwa kebijakan pembelian Tokyo 2020 belum sepenuhnya menyikapi kekhawatiran lingkungan hidup, seperti tidak diumumkannya **hasil pengadaan** dan tidak adanya peninjauan eksternal terhadap kode pembelian.

Malaysia berhasil **mengajukan** penerapan sertifikasi MSPO di samping RSPO dan ISPO untuk kebijakan pembelian dalam rangka Olimpiade. Pada tahun 2018, Menteri Industri Primer Malaysia, Teresa Kok menyatakan bahwa kementerian, kelembagaan dan industri bekerjasama dalam memastikan bahwa sertifikasi MSPO diakui oleh negara pengimpor. Pemerintah Malaysia **melihat** tindakan tersebut sebagai suatu langkah besar menuju minyak sawit Malaysia yang diakui secara global sehingga “mempertinggi merek dan citra minyak sawit Malaysia.” Standar MSPO dan ISPO umumnya **dinilai rendah** dalam persyaratan keberlanjutan dan sosial dibanding standar RSPO yang diakui secara lebih luas di dunia internasional. Namun, standar RSPO pun juga **dikritik** karena gagal dalam memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial.

Menjelang Olimpiade Tokyo, para produsen kayu lapis semakin diawasi LSM karena praktik yang tidak berkelanjutan

Menjelang Olimpiade Tokyo, eksportir kayu ke Jepang mendapat pengawasan yang lebih ketat dari LSM atas kegiatan yang tidak berkelanjutan. Pada bulan November 2018, Rainforest Action Network, WALHI, TUK Indonesia dan Profundo **mengungkapkan** bahwa Korindo, sebagai eksportir, dan Sumitomo Forestry, sebagai importir, telah menyediakan kayu lapis untuk pembangunan Ariake Arena, yaitu arena bola voli untuk Olimpiade Tokyo 2020. Meskipun persyaratan terkait legalitas, keberlanjutan, keselamatan pekerja dan hak masyarakat adat terkandung dalam Kode Pembelian Berkelanjutan Tokyo 2020 untuk **Kayu**, Sumitomo Forestry secara tidak langsung **memasok** kayu lapis dari perusahaan hutan tanaman industri bernama PT Tunas Alam Nusantara (PT TAN), yang telah membuka habitat orang utan di Provinsi Kalimantan Timur. Dari tahun 2016 sampai 2017, pabrik kayu lapis Korindo **menerima** bahan dari PT TAN ketika memproduksi dan mengekspor kayu lapis ke Sumitomo Forestry di Jepang.

Sama seperti RSPO, merek dagang FSC untuk produk kayu berkelanjutan telah **dikecam** oleh LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup karena memungkinkan perusahaan untuk melakukan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. **Peraturan Kayu Bersih** Jepang mewajibkan para importir kayu Jepang untuk memverifikasi asal-usul produk kayunya. Hal ini dapat dilakukan melalui skema sertifikasi industri yang dijalankan oleh asosiasi kehutanan dan produk hutan atau melalui skema sertifikasi hutan pihak ketiga/sistem sertifikasi *chain of custody* (CoC) seperti Forest Stewardship Council (FSC) atau Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Banyak perusahaan memilih sertifikasi FSC untuk

menjamin bahwa kayu yang masuk di rantai pasokannya telah diproduksi secara berkelanjutan. Namun demikian, beberapa pemasok kayu lapis Indonesia seperti Hardaya saat ini bersertifikasi FSC dan PEFC, sekalipun mitra CRR, Aidenvironment, mendeteksi terjadinya deforestasi di kegiatan operasionalnya antara tahun 2016 dan 2020.

Kegiatan olimpiade telah mendorong keanggotaan RSPO di Jepang, tetapi isu keberlanjutan masih menjadi masalah

Standar pengadaan Olimpiade Tokyo, yang mencakup minyak sawit bersertifikasi, mendorong perusahaan Jepang untuk mengintensifkan kegiatan keberlanjutan melalui keanggotaan RSPO. Laporan dari USDA GAIN menyatakan, “Meskipun penggunaan minyak sawit dari negara tropis sudah lama menjadi isu kontroversial di negara Barat, Olimpiade Tokyo 2020 memperkenalkan isu tersebut kepada masyarakat Jepang.” Jumlah perusahaan Jepang yang menggunakan minyak sawit bersertifikasi RSPO melonjak dari 37 perusahaan pada tahun 2015 menjadi [221 anggota](#) pada bulan Desember 2020.

Meskipun Olimpiade seolah-olah memobilisasi isu-isu keberlanjutan di Jepang, dampak luasnya belum terlihat. Sepertinya strategi perusahaan untuk memenuhi syarat keberlanjutan lebih banyak mengandalkan skema sertifikasi yang bersifat sukarela. Oleh karena itu, persyaratan yang tercantum dalam [kode pembelian](#) Olimpiade telah [meningkatkan](#) jumlah anggota RSPO. Namun, pada tahun 2019, dari keseluruhan minyak sawit yang diimpor ke Jepang, baru [2 persen](#) yang bersertifikat RSPO, berbeda dengan perusahaan Belgia dan Jerman, yang masing-masing sebesar 84 dan 47 persen.

Meskipun perusahaan mempromosikan keberlanjutan melalui keanggotaan RSPO, pada praktiknya label ‘mixed’ dari RSPO di berbagai produk Jepang belum membuktikan adanya praktik keberlanjutan yang lebih baik.

Label RSPO di berbagai produk Jepang menyatakan “*mixed*”, yang berarti minyak sawit yang tidak berkelanjutan tercampur dengan minyak sawit bersertifikasi. Walaupun perusahaan Jepang telah berusaha untuk mengangkat isu-isu keberlanjutan, selama ini minyak bersertifikasi seringkali merupakan campuran dengan minyak yang tidak bersertifikasi. Ketika perusahaan Jepang mengimpor minyak sawit bersertifikasi, [98 persen](#) minyak bersertifikasi RSPOnya tergolong sebagai “*mass balance*” (MB) atau “*book and claim*” (BC). Golongan MB mengacu pada campuran minyak sawit bersertifikasi dengan minyak sawit biasa yang tidak dapat terlacak pada titik tertentu dalam rantai pasokan. Golongan BC mengacu pada minyak sawit yang berasal dari rantai pasokan yang tidak dimonitor, tetapi produk tersebut berasal dari produsen yang membeli “[volume credit](#)” minyak sawit bersertifikasi RSPO sebagai langkah pertama menuju sertifikasi.

Pada akhirnya, kode pembelian yang diatur Olimpiade untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan sifatnya masih lemah karena mengizinkan masuknya minyak sawit berlabel “*mass balance*” RSPO. Dengan demikian, minyak sawit yang tidak bersertifikasi dan tidak berkelanjutan dapat saja digunakan untuk Olimpiade.

Pembeli minyak sawit tidak langsung di Jepang barangkali menjadi risiko “leakage” yang lebih besar dibanding pembeli langsung

Importir Jepang membeli 97 persen minyak sawit Indonesianya dari pedagang NDPE

Pada tahun 2019-2020, tujuh importir terbesar minyak sawit di Jepang membeli [93 persen volume minyak sawit Indonesia](#) dari eksportir NDPE Royal Golden Eagle (RGE) dan Musim Mas. Masing-masing pedagang tersebut berkontribusi pada ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 60 persen ([314.866 MT](#))

dan 33 persen ([172.344 MT](#)) ke Jepang dari tahun 2019 sampai bulan November 2020 (lihat Gambar 4 di bawah). Selain itu, Wilmar International dan PT Energi Unggul Persada masing-masing memasok 2 persen di bawah komitmen NDPE. PT Energi Unggul Persada, yang merupakan bagian dari KPN Corporation Group (sebelumnya GAMA), diwajibkan untuk [menerapkan dan berkomitmen](#) pada kebijakan KPN Corporation mengenai NDPE sebelum akhir tahun 2019. Sebesar 3 persen (13.331 MT) sisanya berasal dari perusahaan pengolahan dan pedagang “leakage”, termasuk PT New Energy Development Dumai (10.450 MT), PT Tunas Baru Lampung (2.880 MT) dan Salim Group (2.001 MT). Salim Group mempunyai [kebijakan NDPE](#), namun penerapannya masih [kurang](#). PT New Energy Development Dumai adalah bagian dari perusahaan Jepang bernama New Energy Development Co. yang mempunyai [rencana pengembangan](#) yang cukup signifikan untuk instalasi pembangkit listrik tenaga biomasnya yang menggunakan minyak dan cangkang sawit sebagai bahan bakar utama. Perusahaan tersebut tidak mengumumkan kebijakan NDPE.

Ada kontroversi terbaru terkait kepatuhan RGE Group pada kebijakan NDPEnya, terutama dengan perusahaan dagang dan pengolahan minyak sawitnya, APICAL dan perusahaan pulp dan kertasnya, APRIL. [Video](#) terbaru dari Aidenvironment-Earthqualizer mengaitkan RGE dengan anak perusahaan Nusantara Fiber Group bernama PT Industrial Forest Plantation yang sudah melakukan deforestasi seluas 10.000 ha di pulau Kalimantan, Indonesia. 50.000 ha hutan lainnya juga berada dalam risiko pembukaan hutan dalam waktu dekat. RGE telah membantah tuduhan hubungan dengan Nusantara Fiber Group, sebuah perusahaan dengan struktur kepemilikan yang dirahasiakan, meskipun terhubung [dalam berbagai cara](#) dengan grup tersebut. RGE Group menerima [pinjaman](#), antara lain dari bank Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan bank Belanda, ABN AMRO.

Selain itu, [dilaporkan bahwa](#) “lebih dari 100 komunitas, sedang atau pernah terlibat secara aktif dalam konflik dengan RGE dan pemasoknya” dan terkait dengan anak perusahaan pulp dan kertas RGE, APRIL. APRIL [disorot](#) sebagai salah satu grup perusahaan terbesar di mana kebijakan dan prosedur operasi standarnya gagal menghormati hak masyarakat setempat mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC).

Gambar 4: Pemasok utama minyak sawit Indonesia ke Jepang (2019-2020)

Grup eksportir	Ekspor minyak sawit (x MT)	Pangsa ekspor minyak sawit (%)	Kebijakan NDPE
Royal Golden Eagle	314.886	60%	Ada , namun terdapat isu ketidakpatuhan serius baru-baru ini
Musim Mas	172.344	33%	Ada
Energi Unggul Persada (KPN Corp)	10.800	2%	Ada
New Energy Development Dumai (New Energy Development Co.)	10.450	2%	Tidak ada
Wilmar International	8.589	2%	Ada
Tunas Baru Lampung	2.880	0,6%	Tidak ada
Salim Group	2.001	0,4%	Ada , namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya
Mahkota Group	150	<0,1%	Ada
Lainnya	1	<0,1%	-
Total	522.100	100%	

Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan [data](#) ekspor Indonesia. Data perdagangan tahun 2020 baru sampai bulan November 2020. Oleh karena data ini hanya mencakup data ekspor dari Indonesia ke Jepang, dan belum mencakup data ekspor Malaysia, maka daftar eksportir minyak sawit ke Jepang ini barangkali kurang lengkap.

“Leakage” kemungkinan akan terjadi, mengingat di antara tujuh importir terbesar minyak sawit Indonesia di Jepang, baru ITOCHU saja yang mempunyai kebijakan NDPE di tingkat grup. Perusahaan dagang Mitsui & Co. dan Mitsubishi Corporation menetapkan tahun 2030 sebagai target pencapaian 100 persen pengadaan minyak sawit berkelanjutan (lihat Gambar 5). Meskipun Mitsubishi sudah mempunyai [kebijakan NDPE](#), kebijakannya dianggap lemah karena tidak mengharuskan FPIC dan nol pembakaran. Bersamaan dengan isu kepatuhan di basis pemasoknya (seperti Royal Golden Eagle), kebijakan yang lemah lebih memungkinkan masuknya minyak sawit **“leakage”** di rantai pasok.

Gambar 5: Tujuh importir terbesar minyak sawit Indonesia di Jepang pada tahun 2019 dan 2020, termasuk grup eksportir

Grup Impor – Ekspor Jepang	Impor minyak sawit tahun 2019 (MT)	Impor minyak sawit tahun 2020 (MT)	Kebijakan NDPE importir
Mitsui & Co.	86.723	61.275	Tidak ada, tahun 2030 ditetapkan sebagai target untuk 100% pembelian minyak sawit yang berkelanjutan dan bersertifikasi
Musim Mas	55.153	38.998	
Royal Golden Eagle (Asian Agri/Apical)	30.769	22.277	
Wilmar International	799	-	
Sojitz Building Material Co.	54.091	62.049	Tidak ada
Royal Golden Eagle (Asian Agri/Apical)	54.091	62.049	
Mitsubishi Corporation	48.317	55.142	Ada , tetapi masih lemah. Tahun 2030 ditetapkan sebagai target untuk 100% pembelian minyak sawit yang berkelanjutan
Mahkota Group	-	150	
Royal Golden Eagle (Asian Agri/Apical)	48.317	54.992	
ITOCHU Corporation	27.701	34.737	Ada . Tahun 2025 ditetapkan sebagai target untuk 100% pembelian minyak sawit yang berkelanjutan
Musim Mas	19.242	21.098	
Royal Golden Eagle (Asian Agri/Apical)	8.460	9.549	
Wilmar	-	4.089	
Mitsui dan Co. (TKPMI section)	-	55.330	Tidak ada. Lihat di atas
Musim Mas	-	36.551	
Royal Golden Eagle (Asian Agri/Apical)	-	18.780	
Kamisu Power Plant LLC	1.300	16.500	Tidak ada
Energi Unggul Persada	-	10.800	
Musim Mas	1.300	-	
Salim Group	-	2.000	
Wilmar	-	3.700	
Inabata & Co. (Sumitomo Chemical)	10.450	-	Tidak ada
New Energy Development Dumai	10.450	-	
8 importir lain	3.381	5.104	
Total	231.963	290.137	

Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan [data perdagangan](#). Data tahun 2020 baru sampai bulan November 2020. Selain itu, data perdagangan baru meliputi data ekspor Indonesia ke Jepang, dan bukan data ekspor Malaysia. Hal tersebut barangkali menjelaskan mengapa Fuji Oil Holdings, sebagai salah satu pengguna minyak sawit terbesar di Jepang yang lebih banyak melakukan pembelian di Malaysia, tidak tercantum di gambar ini.

Pengguna terbesar minyak sawit, Fuji Oil, dan pemegang saham ITOCHU, dikaitkan dengan pembukaan lahan seluas 9.270 ha pada tahun 2020

Perusahaan Fuji Oil Holdings, yang terdaftar di bursa, merupakan pengguna produk minyak sawit terbesar di Jepang. Perusahaan tersebut mengonsumsi [776.000 MT](#) minyak sawit mentah, minyak inti kelapa sawit, dan minyak sawit murni pada tahun 2019, di mana sebagian besar [volumenya](#) dibeli dari Malaysia (58 persen), sedangkan sisanya berasal dari Indonesia (38 persen), Papua Nugini (3 persen) dan Thailand (1 persen). Pada tahun 2019, perusahaan tersebut menghabiskan 11-20 persen biaya pengadaannya untuk produk-produk minyak sawit ini. Produk minyak sawit Fuji Oil menghasilkan [21-30 persen](#) penghasilan neto perusahaan tersebut. Perusahaan dagang dan *sogo shosha* Jepang, ITOCHU Corporation adalah [pemegang saham terbesar](#) di Fuji Oil dan salah satu dari tujuh pembeli utama minyak sawit Indonesia (lihat Gambar 5 di atas).

Fuji Oil menetapkan target tahun 2030 untuk memperbaiki kinerja keberlanjutannya, dengan menjalin hubungan rantai pasokan dengan [Mars](#) melalui [UniFuji](#), yaitu kemitraan antara Fuji Oil dan United Plantations. Fuji Oil, yang [mempromosikan](#) kebijakan NDPE di dalam grupnya, sudah mempunyai [kebijakan](#) pembelian bertanggung jawab untuk minyak sawit sejak tahun 2016. Perusahaan tersebut juga mempunyai [mekanisme pengaduan](#) publik, dan bertujuan mencapai 100 persen pembelian minyak sawit berkelanjutan sebelum tahun [2030](#).

Aidenvironment mengidentifikasi hilangnya **4.732 ha hutan, hutan gambut dan lahan gambut di basis pasokan minyak sawit Fuji Oil Holdings pada tahun 2020**. Dari [1.395](#) pabrik pemasok perusahaan tersebut, 62 diketahui tidak mematuhi NDPE, dan dua lagi berpotensi tidak patuh (lihat Gambar 6 di bawah). Ketujuh grup pemasok ini bertanggung jawab atas 46 persen (2.193 ha) minyak sawit tidak patuh yang masuk di basis pasokan Fuji Oil pada tahun 2020. Selain itu, dua grup perusahaan yang terdaftar sebagai [pelaku deforestasi terbesar](#) di areal konsesi di Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini pada tahun 2020, yakni Capital Group dan Jhonlin Group, mengoperasikan pabrik yang terdapat di rantai pasokan berbagai perusahaan dan merek yang mempunyai kebijakan NDPE, termasuk Fuji Oil.

Aidenvironment mendeteksi deforestasi seluas **4.538 ha pada tahun 2020 di rantai pasokan minyak sawit milik pemegang saham utama Fuji Oil, yaitu ITOCHU Corporation**. ITOCHU, perusahaan dagang Jepang yang tidak mempunyai pabrik kelapa sawit atau pabrik pengolahan, membeli [308.000 MT](#) minyak sawit dan produk minyak sawit pada tahun 2019, di mana 91 persen volume minyak sawit mentahnya dilaporkan berasal dari [688 pabrik](#). Dari pabrik tersebut, 40 diketahui tidak patuh dan menyebabkan hilangnya hutan dan gambut seluas 4.538 ha pada tahun 2020. Pelaku deforestasi terbesar di rantai pasokannya pada umumnya sama seperti pemasok Fuji Oil (lihat Gambar 6). ITOCHU mempunyai [kebijakan NDPE](#) yang berlaku atas pembelian kayu, pulp & kertas, karet dan minyak sawit dan menargetkan pembelian 100 persen minyak sawit berkelanjutan sebelum tahun [2025](#).

Gambar 6: Pemasok Fuji Oil Holdings dengan deforestasi di atas 200 ha pada tahun 2020

Grup	Pabrik anak perusahaan dengan deforestasi	Total deforestasi tahun 2020 (ha)	Details
IJM Corporation Berhad	PT Prima Alumga	569	IJM Corporation Berhad, dengan kebijakan NDPE , memiliki enam pabrik di Malaysia dan Indonesia. Fuji Oil melakukan pembelian langsung dari dua di antaranya: PT Indonesia Plantation Synergy dan IJM Edible Oils Sdn Bhd
Saraswanti Group	PT Saraswanti Agro Estate	409	Fuji Oil melakukan pembelian langsung dari PT Saraswanti Sawit Makmur , anak perusahaan Saraswanti Group lainnya

Grup	Pabrik anak perusahaan dengan deforestasi	Total deforestasi tahun 2020 (ha)	Details
SIPEF	PT Dendy Marker Indah Lestari	279	Fuji Oil membeli minyak sawit dari PT Tolan Tiga Indonesia, PT Agro Muko, PT Eastern Sumatra Indonesia, Hargy Oil Palms Ltd dan PT Umbul Mas Wisesa, Semuanya ada di bawah SIPEF group yang memiliki 11 pabrik kelapa sawit di Indonesia, Papua Nugini dan Pantai Gading dan telah berkomitmen pada kebijakan NDPE
Anglo-Eastern Plantations PLC	PT Kahayan Agro Plantation PT Sawit Graha Manunggal	259	Fuji Oil melakukan pembelian minyak sawit dari Anglo-Eastern Plantations (AEP), yaitu perkebunan PLC Group di Indonesia, PT Mitra Puding Mas, PT Alno Agro Utama, PT Tasik Raja dan PT Bina Pitri Jaya (UK). Grup tersebut mempunyai kebijakan NDPE dan tercantum di daftar pengaduan Bunge dan Cargill di bawah PT Kahayan Agro Plantation (KAP), di mana AEP menjadi pemegang saham mayoritas. Baik Bunge maupun Cargill tidak membekukan perusahaan ini.
Double Dynasty Sdn Bhd	DD Pelita Sebungan Plantation Sdn Bhd (1-3 Estate) Mutiara Pelita Genaan Plantation Sdn Bhd (Estate: Mutiara Pelita Genaan 1 - 3)	243	Fuji Oil melakukan pembelian minyak sawit dari DD Palm Oil Mill Sdn Bhd di Sarawak, Malaysia, yaitu anak perusahaan Double Dynasty Sdn Bhd. DD tercantum di daftar pengaduan Wilmar dan Bunge pada tahun 2019 dan 2020. Namun, Wilmar mengakhiri pembekuannya sedangkan Bunge tetap melakukan pembelian darinya.
First Resources Ltd	PT Borneo Persada Prima Jaya PT Citra Agro Kencana PT Ketapang Agro Lestari PT Maha Karya Bersama	234	First Resources beroperasi di bawah kebijakan NDPE , dan memiliki 15 pabrik di Sumatera dan Kalimantan. Fuji Oil melakukan pembelian dari 11 pabriknya. Perusahaan ini belum mengajukan penilaian NKT untuk penelaahan sejawat. Unilever menghentikan pembelian dari perusahaan ini sejak tahun 2018.
Haji Anif Shah	PT Anugerah Niaga Sawindo	200	Fuji Oil melakukan pembelian dari PT Anugerah Langkat Makmur di Sumatera, yaitu pabrik lain milik Haji Anif Shah.
Grup lainnya	-	2.539	-
Total	62 pabrik yang tidak patuh (2 yang berpotensi tidak patuh*)	4.732 (735)*	-

Sumber: Aidenvironment/Earthqualizer. *Pabrik YP Plantation Holdings Sdn Bhd (Pekan Timur Estate) dari Yayasan Pahang Group dan PT Arjuna Utama Sawit, milik Mr. Alexander Thaslim ada di antara pemasok yang paling banyak melakukan deforestasi, masing-masing seluas 417 ha dan 318 ha (total 735 ha). Meskipun barangkali berkaitan dengan Fuji Oil Holdings, keterkaitannya tidak dapat dipastikan.

Perusahaan FMCG Jepang mengadakan volume minyak sawit yang cukup signifikan sehingga kemungkinan akan risiko “leakage” bertambah besar

Perusahaan barang konsumen cepat gerak atau *fast-moving consumer goods* (FMCG) Jepang, termasuk Nissin Foods Group, Calbee, Lion, Moringa Milk Industry dan Kao membeli minyak sawit dan produk minyak sawit dalam volume yang cukup signifikan. Kao Corporation membeli minyak sawit dan produk minyak sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu sebesar [11-20 persen](#) dari total pengadaannya, sedangkan Calbee Inc., Moringa Milk Industry dan Lion Corporation [mengumumkan](#) nilai satu sampai lima persen dari pengadaannya untuk pembelian minyak sawit. Nissin Foods Group [tidak menanggapi](#) permintaan data mengenai usaha minyak sawitnya. Perusahaan FMCG lain, seperti [Ajinomoto Group](#), mengeluarkan kurang dari 1 persen dari total pengadaannya untuk pembelian minyak sawit.

Baru [Kao Corporation](#) dan [Nissin Foods Group](#) saja yang mempunyai komitmen NDPE. Terlihat bahwa Kao Corporation paling maju dalam hal komitmen, dengan [target](#) nol-deforestasi tahun 2020 dan [pengumuman](#) publik mengenai pabrik kelapa sawitnya. Kebijakan NDPE Nissin Foods Group [direvisi](#) pada tahun 2020 supaya mencakup pengadaan minyak sawit yang berkelanjutan dan bebas konflik, namun target untuk pengadaan berkelanjutan 100 persen ditetapkan untuk tahun [2031](#). Perusahaan tersebut tidak menerbitkan daftar pemasok minyak sawitnya. Produsen barang konsumen, Moringa Milk Industry, Calbee Inc. dan Lion Corporation tidak mempunyai kebijakan NDPE dan tidak menerbitkan daftar nama pabrik pemasoknya. Meskipun sudah menjadi anggota RSPO, ketiga perusahaan ini umumnya membeli minyak sawit golongan [BC](#) dan [MB](#).

“Leakage” minyak sawit yang tidak berkelanjutan melalui perusahaan FMCG dimungkinkan oleh terbatasnya komitmen NDPE dan penerapannya oleh sebagian besar pembeli, kurangnya *screening* terhadap pemasok, dan rantai pasokan yang tidak transparan.

Meskipun di posisi terdepan dalam pelaporan dan pengungkapan terkait keberlanjutan, pemasok Kao terhubung dengan deforestasi seluas 9.523 ha

Perusahaan FMCG Jepang, Kao Corporation membeli minyak sawit dan produk minyak sawit dalam volume yang cukup signifikan dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Perusahaan tersebut mengeluarkan [11-20 persen](#) dari nilai pengadaannya untuk pembelian minyak sawit mentah, minyak inti kelapa sawit mentah dan produk turunannya yang digunakan di usaha barang konsumennya, serta asam lemak yang digunakan di usaha kimianya. Pada tahun 2020, Kao mengonsumsi [446.000 MT](#) produk minyak sawit. Selain itu, perusahaan tersebut menyatakan bahwa [81-90 persen](#) dari total penghasilannya bergantung pada produk yang mengandung produk turunan minyak sawit dan minyak inti sawit.

Kao Corporation, yang didirikan pada tahun 1887 [melaporkan](#) penghasilan sebesar JPY 1.382 miliar (\$AS 12 juta) dan 33.603 karyawan tetap per tanggal 31 Desember 2020. Produk barang konsumennya mencakup kosmetik ([20,1 persen](#) penjualan neto terkonsolidasi pada tahun keuangan 2019), perawatan kulit dan rambut (22,7 persen), perawatan kesehatan manusia (17 persen) serta bahan tekstil dan perawatan rumah tangga (23,9 persen). Sementara, segmen usaha kimianya menghasilkan 16,3 persen. Kao Corporation, bersama anak perusahaan Royal Golden Eagle bernama Apical, mengoperasikan PT Apical Kao Chemicals. Usaha kerjasama ini [mendukung](#) Kao untuk memperoleh bahan baku yang memenuhi kebutuhan unit usaha kimianya.

Kao Corporation telah memasukkan pembelian bertanggungjawab untuk minyak sawit dan produk kayu di agendanya. Kemungkinan perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan FMCG Jepang yang mengumumkan [daftar pabrik pemasok](#) kelapa sawitnya untuk tahun 2019. Tiga perusahaan Jepang lainnya yang mengumumkan daftar pabrik kelapa sawitnya berupa perusahaan dagang, yakni [Fuji Oil](#), [ITOCHU Corporation](#) dan [Nisshin Oillio](#) (dengan Marubeni sebagai pemegang saham utama). Kao telah menyusun [pedoman](#) pembelian untuk minyak sawit dan kertas yang isinya berkomitmen pada nol-deforestasi dan menghindari pembelian minyak sawit yang berasal dari perkebunan yang dibangun di areal hutan dan lahan gambut. Pada bulan Februari 2021, perusahaan tersebut [diakui](#) oleh [CDP](#), yaitu sebuah organisasi nirlaba dengan fokus pada sistem pemaparan global tentang dampak lingkungan hidup, sebagai pemasok terdepan dari segi “*engagement*” untuk tahun keempat berturut-turut karena tekadnya dalam mengurangi emisi karbon dan menyikapi perubahan iklim sepanjang rantai pasoknya. Kao sudah menjadi [anggota RSPO](#) sejak bulan April 2007. Pada awalnya, Kao merencanakan 100 persen minyak sawit terlacak sebelum tahun 2020 melalui minyak sawit bersertifikasi RSPO, namun [menurut laporan](#), perusahaan tersebut memutuskan untuk “*memverifikasi sendiri bahwa minyak sawit yang kami gunakan dapat terlacak dan mengarah ke nol-deforestasi. Keputusan ini diambil karena pasokan minyak tersertifikasi ke pasar masih belum mencukupi, dan beberapa LSM bidang lingkungan hidup sudah*

menunjukkan bahwa minyak bersertifikasi belum tentu mengarah ke nol-deforestasi, atau sepenuhnya melindungi hak asasi manusia.”

Namun, kegiatan pengawasan deforestasi tahun 2020 oleh Aidenvironment-Earthqualizer terhadap para pemasok Kao menunjukkan bahwa sistem verifikasi perusahaan tersebut masih kurang memadai. Dengan demikian, perusahaan FMCG tersebut telah menjadi pembeli “leakage” yang penting untuk minyak sawit dan produk sawit yang tidak berkelanjutan. Dari 1.027 pabrik pemasoknya, 57 pabrik yang tidak patuh melakukan deforestasi atas 9.523 ha hutan, hutan gambut, atau lahan gambut di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020. Gambar 7 di bawah memperlihatkan pelaku deforestasi terbesar pada tahun 2020 yang berkaitan dengan Kao Corporation. Keenam grup perusahaan yang dimaksud melakukan 75 persen (7.185 ha) dari seluruh deforestasi di areal perkebunan kelapa sawit yang memasok Kao Corporation pada tahun 2020. Ciliandry Anky Abadi (CAA), IndoGunta dan Jhonlin Group juga tercantum di daftar [10 besar pelaku deforestasi](#) di Asia Tenggara untuk tahun 2020

Gambar 7: Pemasok Kao dengan paling banyak defore. stasi pada tahun 2020

Grup	Anak perusahaan pabrik dengan deforestasi	Total deforestasi 2020 (ha)	Rincian
Ciliandry Anky Abadi	PT Citra Agro Abadi PT Agrindo Green Lestari PT Inti Kebun Lestari	3.453	Kao melakukan pembelian langsung dari PT Borneo Ketapang Indah yang juga dimiliki Ciliandry Anky Abadi (CAA). Hampir semua perusahaan pengolahan/dagang yang mempunyai kebijakan NDPE telah membekukan perdagangan dengan CAA.
IndoGunta	PT Rimbun Sawit Papua PT Sawit Berkah Sejahtera PT Subur Karunia Raya PT Permata Nusa Mandiri	1.179	Kao melakukan pembelian langsung dari PT Gunta Samba Jaya , yaitu anak perusahaan IndoGunta lainnya. Hampir semua perusahaan pengolahan/dagang yang mempunyai kebijakan NDPE telah membekukan perdagangan dengan IndoGunta.
Jhonlin Group	PT Kurun Sumber Rezeki PT Jhonlin Agro Raya PT Multi Sarana Agro Mandiri PT Senabangun Anekapertiwi PT Pradiksi Gunatama	955	Kao melakukan pembelian langsung dari PT Batulicin Agro Sentosa (Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan), yaitu anak perusahaan Jhonlin Group lainnya. Grup tersebut dikaitkan dengan konflik lahan .
Sungai Budi Group/Tunas Baru Lampung	PT Samora Usaha Jaya PT Budiduta Agromakmur	620	Tunas Baru Lampung mempunyai enam pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan Barat. Hampir semua perusahaan pengolahan/dagang yang mempunyai kebijakan NDPE telah membekukan perdagangan dengan Tunas Baru Lampung. Namun, Kao mengumumkan anak perusahaan Sungai Baru Lampung sebagai grup pemasok.
IJM Corporation Berhad	PT Prima Alumga	569	IJM Corporation Berhad mempunyai enam pabrik kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia. Kao mengumumkan IJM Plantations Berhad (anak perusahaan) sebagai pemasok.
Saraswanti Group	PT Saraswanti Agro Estate	409	Kao melakukan pembelian langsung dari PT Saraswanti Sawit Makmur, yaitu anak perusahaan Saraswanti Group lainnya.
Grup lainnya	-	2.338	-
Total	57 pabrik yang tidak patuh	9.523	-

Sumber: Aidenvironment/Earthqualizer, berdasarkan data deforestasi (Satelit Sentinel 1 dan 2)

Permintaan Jepang akan kayu lapis dikaitkan dengan deforestasi dan minyak sawit “leakage”

Eksportir utama kayu lapis Indonesia ke Jepang dikaitkan dengan minyak sawit “leakage”

Sepuluh eksportir terbesar kayu lapis Indonesia ke Jepang membuka 15.340 ha lahan untuk perkebunan kelapa sawit dari tahun 2016 sampai 2020 (lihat Gambar 8). Antara tahun 2018-2020, mereka mengekspor 599.819 MT kayu lapis ke Jepang, yaitu 70 persen dari total volume ekspor. Tujuh dari kesepuluh grup perusahaan tersebut juga menanam kelapa sawit, namun tidak satupun yang menerapkan kebijakan NDPE grup yang mencakup seluruh kegiatan perkebunannya.

Gambar 8: Sepuluh eksportir terbesar kayu lapis Indonesia ke (Sept 2018 - Sept 2020)

Grup perusahaan	Ekspor kayu lapis ke Jepang dari bulan Sept 2018 s/d Sept 2020 (MT)	Pangsa pasar (%)	Kebijakan NDPE di tingkat grup	Status sertifikasi	Deforestasi (ha) untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit (2016-2020)
Kayan Patria Pratama (KPP) Group	83.819	10%	Tidak ada	Tidak diketahui	2.993 ha oleh PT Alhada Agro Sejahtera, PT Hanusentra Agro Karet, PT Kayan Plantation, PT Kukar Commodities Worldwide dan PT Tanjung Manis Artha Lestari
Alas Kusuma Group	73.461	9%	Tidak ada	Anak perusahaan PT Suka Jaya Makmur dan Sari Bumi Kusuma bersertifikasi FSC (CoC)*	Anak perusahaan lain, PT Kusuma Alam Sari dan PT Sawit Jaya Makmur, telah membuka 3.437 ha
Sumber Mas Indah Plywood	73.246	9%	Tidak ada	Bersertifikasi FSC (CoC)	-
Korindo	69.069	8%	Tidak ada	FSC ‘ Asosiasi Bersyarat ’	5.211 ha oleh PT Dongin Prabhawa, PT Gelora Mandiri Menbangun, PT Papua Agro Lestari dan PT Tunas Sawaerma 1B
Harita Group	61.763	7%	Tidak ada . Kebijakan NDPE untuk kegiatan minyak sawit melalui Bumitama	Bersertifikasi RSPO	908 ha oleh PT Andalan Sukses Makmur, PT Damai Agro Sejahtera, PT Karya Makmur Langgeng dan PT Tanah Tani Lestari
Aris Sunarko @ Ko Tji Kim	54.623	6%	Tidak ada	Tidak diketahui	-
Keluarga Ananto	50.654	6%	Tidak ada	Anak perusahaan PT Surya Satrya Timur bersertifikasi FSC (CoC)	Anak perusahaan lain, PT Kebun Sawit Nusantara dan PT Tunas Alam Nusantara, telah membuka 293 ha
PT Central Cipta Murdaya (CCM)	46.817	5%	Tidak ada	Anak perusahaan PT Intracawood Manufacturing bersertifikasi FSC	Anak perusahaan lain, PT Hardaya Inti Plantation dan PT Sebuku Inti Plantation, telah membuka 1.292 ha

Grup perusahaan	Ekspor kayu lapis ke Jepang dari bulan Sept 2018 s/d Sept 2020 (MT)	Pangsa pasar (%)	Kebijakan NDPE di tingkat grup	Status sertifikasi	Deforestasi (ha) untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit (2016-2020)
Sampoerna	43.327	5%	Tidak ada. Kebijakan keberlanjutan untuk minyak sawit melalui Sampoerna Agro Tbk	Anak perusahaan PT Putra Sumber Utama Timber , PT Sumber Graha Sejahtera dan PT Hutan Ketapang Industri bersertifikasi FSC (CoC). Bersertifikasi RSPO	1.206 ha oleh PT Anugerah Palm Indonesia, PT Lanang Agro Bersatu, PT Sawit Selatan, PT Sungai Rangit Jaya dan PT Tania Binatama
Tanjung Raya Plywood	43.040	5%	Tidak ada	Tidak diketahui	-
Total	599.819	70%	-		15.340

Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan [data perdagangan](#), situs web perusahaan dan data deforestasi Aidenvironment-Earthqualizer (Satelit Sentinel 1 dan 2). *CoC adalah singkatan dari Sertifikasi [Chain of Custody](#), yaitu, bahan bersertifikasi FSC yang sudah teridentifikasi dan terpisahkan dari bahan yang tidak bersertifikasi dan tidak terkontrol.

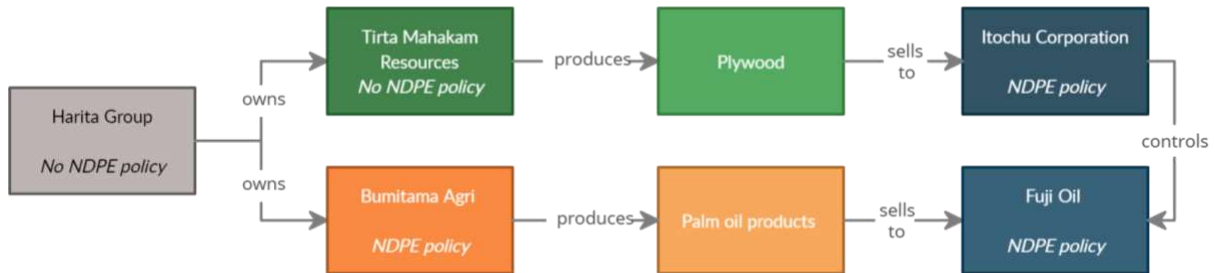
Sebagian besar eksportir kayu lapis Indonesia ini mempunyai struktur kepemilikan yang tidak diketahui, tidak mempunyai situs web publik, dan tidak transparan mengenai pemasok, pembeli dan kegiatan minyak sawitnya. Grup yang paling tertutup adalah PT Kayan Patria Pratama (KPP), PT Alas Kusuma Group, PT Sumber Mas Indah Plywood, Aris Sunarko @ Ko Tji Kim, keluarga Ananto, dan PT Tanjung Raya Plywood:

- KPP mengekspor kayu lapis melalui dua anak perusahaan, yakni [PT Idec Abadi Wood Industries](#) (81.169 MT) yang berlokasi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan memproduksi kayu lapis serta kayu papan, dan PT Kayan Wood Industries (2.650 MT) yang tidak banyak diketahui informasinya.
- PT Alas Kusuma Group mengekspor kayu lapis ke Jepang melalui PT Sari Bumi Kusuma (64.997 MT) dan PT Harjohn Timber (8.463 MT). Kedua perusahaan ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat.
- PT Sumber Mas Indah Plywood adalah [perusahaan pengolahan kayu](#) yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang memproduksi kayu lapis, produk penggergajian dan produk proses sekunder, dengan kapasitas produksi bulanan sebesar 12.000 m³. Perusahaan tersebut mengekspor ke berbagai wilayah, termasuk Asia, Amerika Utara dan Eropa.
- Aris Sunarko @ Ko Tji Kim memiliki dua perusahaan pengolahan, yakni [PT Wijaya Triutama Plywood](#) dan PT Wijaya Cahaya Timber.
- Kegiatan operasional keluarga Ananto bersifat tertutup karena PT Surya Satria Timur maupun PT Wana Cahaya Nugraha tidak mempunyai situs web.
- [PT Tanjung Raya Plywood](#) memproduksi 6.600 m³ produk kayu per bulan dan mengekspor produknya ke berbagai negara, terutama Jepang dan India. Belum diketahui apakah perusahaan ini mempunyai hubungan dengan sektor perkelapasawitan.

Eksportir kayu lapis yang lebih transparan dan diketahui keterkaitannya dengan pembeli minyak sawit NDPE, antara lain adalah Harita Group, PT Central Cipta Murdaya (CCM) dan Sampoerna. Pembeli CCM dengan kebijakan NDPE paling terekspos terhadap risiko deforestasi karena CCM tidak mempunyai kebijakan NDPE, berbeda dengan Harita Group dan Sampoerna yang mempunyai kebijakan NDPE untuk divisi kelapa sawitnya. Harita Group mengekspor kayu lapis melalui [PT Tirta Mahakam Resources](#). Perusahaan tersebut, yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, memproduksi dan menjual kayu lapis dan produk kayu terkait, dan memiliki pabrik di Provinsi Kalimantan Timur. Harita Group adalah

grup perusahaan Indonesia yang bergerak di industri-industri sumber daya alam. Bidang usaha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan peleburan. Sebagian besar pembeli NDPEnya di sektor perkelapasawitan melakukan pembelian dari PT Bumitama, yaitu anak perusahaan kelapa sawit Harita (lihat Gambar 9).

Gambar 9: Keterkaitan Harita Group dengan pembeli NDPE



Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan [data perdagangan](#), [daftar publik tentang pabrik kelapa sawit](#) dan situs web perusahaan.

[PT Intracawood Manufacturing](#) adalah bagian dari Central Corporate Management Group (CCM), yang mengoperasikan berbagai usaha di bidang properti, manufaktur, ritel, teknologi informasi, konstruksi dan sumber daya alam di Indonesia dan di luar negeri. Sepertinya CCM [dimiliki](#) swami isteri Murdaya Widjawimarta Poo dan Siti Hartati Murdaya, yang berada di peringkat 14 di daftar Forbes mengenai orang Indonesia terkaya pada tahun 2011. CCM Group menjual minyak sawit kepada sebagian besar pembeli NDPE, termasuk Unilever, AAK, Cargill, Ferrero, GAR, Nestlé dan P&G melalui PT Hardaya Inti Plantations.

Sampoerna bergerak di berbagai sektor termasuk perbankan, transportasi, properti, hutan tanaman dan perkebunan karet dan kelapa sawit. Grup tersebut mengekspor kayu lapis ke Jepang melalui tiga anak perusahaan, termasuk PT Sejahtera Usaha Bersama (32.558 MT). Perusahaan kelapa sawitnya, [PT Sampoerna Agro Tbk](#), sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007. Per bulan Februari 2021, tiga puluh tujuh pembeli NDPE membeli minyak sawit dari grup perusahaan tersebut.

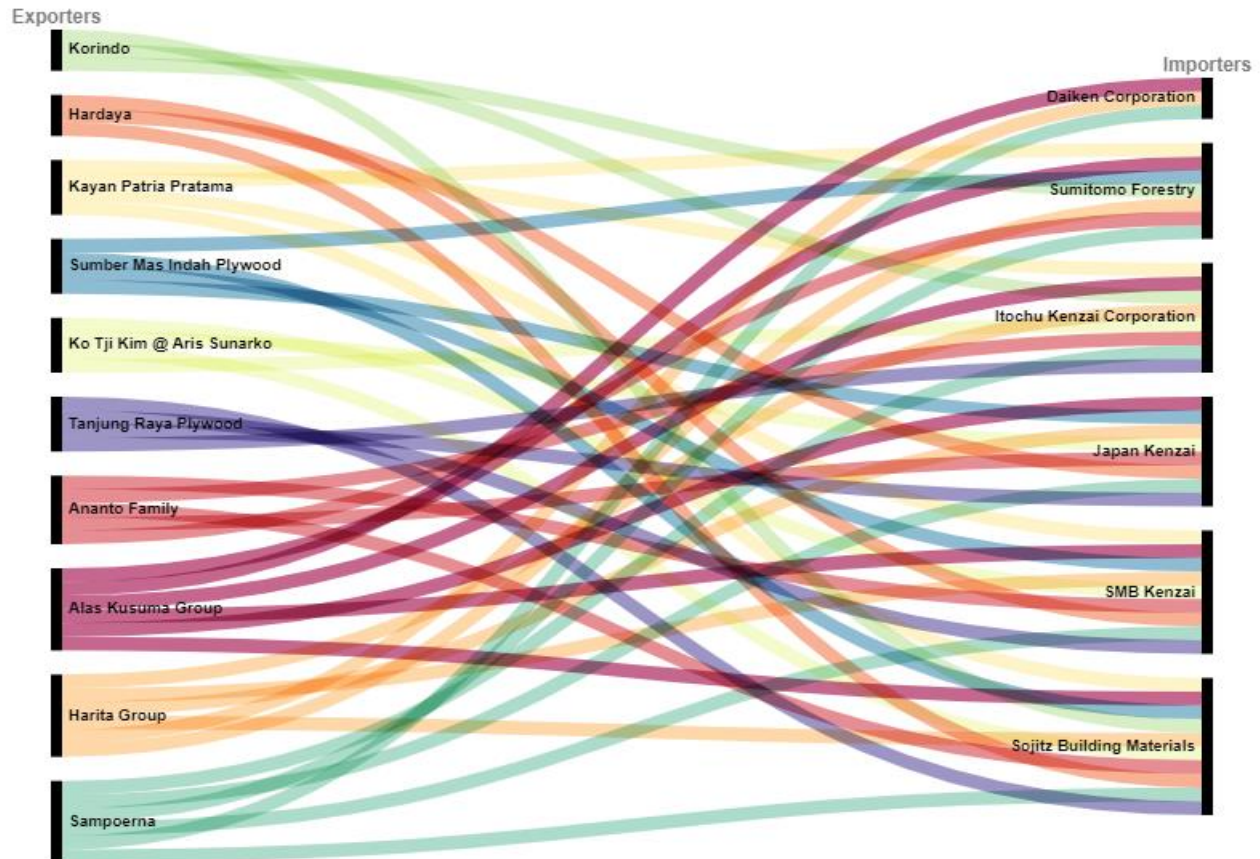
Sepertinya Korindo merupakan eksportir kayu lapis dan minyak sawit yang paling terkenal berkaitan dengan isu-isu kepatuhan. Perusahaan tersebut dituding melakukan kegiatan yang tidak berkelanjutan di bidang [kelapa sawit](#) dan [kayu lapis](#). Anak perusahaan Korindo, yakni PT Korindo Ariabima Sari dan PT Balikpapan Forest Industries, mengekspor kayu lapis, masing-masing sebanyak 40.762 MT dan 28.306 MT. Korindo mengoperasikan empat perusahaan pembalakan dan tujuh pabrik pengolahan, umumnya di Papua dan Kalimantan. Per bulan Februari 2021, perusahaan Avon, Kellogg's dan Mondelez membeli minyak sawit dari Korindo.

Baru dua dari 10 eksportir terbesar kayu lapis Indonesia ke Jepang yang telah menerapkan kebijakan NDPE yang mencakup kegiatan perkelapasawitannya. Kedua eksportir tersebut adalah Harita Group (melalui PT Bumitama) dan Sampoerna (melalui PT Sampoerna Agro Tbk). Belum satupun di antaranya yang menerapkan kebijakan keberlanjutan yang berlaku untuk keseluruhan usaha penanamannya meskipun beberapa di antaranya juga mengusahakan hutan tanaman industri di Indonesia.

Enam perusahaan importir terbesar kayu lapis Indonesia asal Jepang berkaitan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak mempunyai NDPE

Sebagian besar ekspor dari sepuluh grup Indonesia itu diterima oleh enam perusahaan Jepang yang menerima 78 persen, atau 665.246 MT kayu lapis dari tahun 2018-2020. Bagan aluvial di bawah ini (lihat Gambar 10) memperlihatkan hubungan antara eksportir dan importir terbesar kayu lapis Indonesia ke Jepang. Meskipun sudah bersertifikasi FSC, semua importir ini membeli kayu lapis dari perusahaan yang menjalankan kegiatan perkelapasawitan yang tidak terlindungi kebijakan NDPE. Perusahaan Jepang ini belum menerapkan komitmen NDPE antar komoditas di tingkat grup (lihat Gambar 11).

Gambar 10: Hubungan pasokan antara 10 eksportir terbesar kayu lapis Indonesia dan 6 importir terbesar kayu lapis Indonesia di Jepang (Sept 2018 – Sept 2020)



Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan [data perdagangan](#)

Gambar 11: Enam importir terbesar kayu lapis Indonesia di Jepang dari Sept 2018 - Sept 2020

Importir Jepang	Volume impor (MT)	Pangsa pasar (%)	Sertifikasi	Kebijakan NDPE grup
Sumitomo Forestry	233.953	27%	FSC	Tidak ada
Sojitz Building Materials	120.285	14%	FSC dan PEFC	Tidak ada
ITOCHU Kenzai	110.378	13%	FSC dan PEFC	Ada, untuk kayu, karet dan sawit
SMB Kenzai	93.694	11%	FSC dan PEFC	Tidak ada
Daiken Corporation	56.350	7%	FSC dan PEFC	Tidak ada
Japan Kenzai	50.586	6%	FSC dan PEFC	Tidak ada
Total	665.246	78%	-	-

Sumber: Disusun oleh Chain Reaction Research, berdasarkan [data perdagangan](#), situs web perusahaan, dan situs web FSC dan PEFC

Importir utama Jepang yang dikaitkan dengan kayu lapis dan minyak sawit “leakage” adalah Sumitomo Forestry. [Sumitomo Forestry](#) telah [terdaftar](#) di Bursa Efek Tokyo dengan [spesialisasi](#) di bidang pengelolaan sumber daya alam dan usaha konstruksi bangunan. Sumitomo Forestry [memiliki](#) sekitar 48.000 ha hutan dan perkebunan di Jepang, dan 231.000 ha [di luar Jepang](#), yakni di Indonesia, Papua Nugini dan Zealandia Baru. Kegiatan operasional perusahaan tersebut telah dilaporkan oleh beberapa LSM karena [keterkaitannya](#) dengan perusahaan yang melakukan pembalakan yang ilegal dan tidak berkelanjutan di Sarawak (Shin Yang, Samling dan WTK). Baru-baru ini, perusahaan tersebut [terekspos](#) atas pembelian kayu ‘kotor’ dari Korindo. Dari bulan September 2018 sampai September 2020, Sumitomo Forestry juga menerima kayu lapis dari PT Alas Kusuma Group, yang juga mengoperasikan perkebunan kelapa sawit dan tidak mempunyai kebijakan NDPE.

Importir Jepang lainnya yang menerima kayu lapis dari perusahaan yang tidak mempunyai kebijakan NDPE adalah Sojitz Building Materials, ITOCHU Kenzai Corporation, SMB Kenzai, Daiken Corporation dan Japan Kenzai. Sojitz Building Materials [100 persen dimiliki](#) oleh grup perusahaan Jepang, [Sojitz Corporation](#). Sojitz Building Materials bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan, konstruksi dan perumahan, sedangkan Sojitz Corporation adalah grup perusahaan yang [terdaftar](#) di Bursa Efek Tokyo. Sojitz Building Materials membeli kayu lapis dari sembilan di antara 10 grup ekspor terbesar, termasuk Korindo, PT Kayan Patria Pratama dan Hardaya. Lima pemasok Sojitz Building Materials, termasuk PT Kayu Lapis Asli Murni, yang merupakan anak perusahaan Salim Group, menjalankan kegiatan perkelapasawitan dan tidak mempunyai kebijakan NDPE.

ITOCHE Kenzai Corporation, anak perusahaan [ITOCHE Corporation](#), menjalankan [usahanya](#) di sektor konstruksi melalui banyak cabang. Perusahaan tersebut mempunyai [kebijakan](#) pengadaan kayu, yang lebih banyak berfokus pada aspek legalitas. Pada tahun 2017, Rainforest Action Network [melaporkan](#) keterkaitan antara ITOCHU dan perusahaan tidak berkelanjutan yang bergerak di sektor komoditas berisiko terhadap pembukaan hutan (pulp dan kertas, kayu, kelapa sawit dan karet). ITOCHU juga terekspos melalui impor kayu lapisnya, karena empat pemasok kayu lapisnya beroperasi di sektor perkelapasawitan dan tidak mempunyai kebijakan NDPE. Meskipun usaha minyak sawit ITOCHU tercakup oleh [Kebijakan](#) Pembelian Minyak Sawit Bertanggung Jawab yang diterapkan oleh [Fuji Oil](#), perusahaan tersebut tetap melakukan pembelian dari beberapa perusahaan perkebunan di mana deforestasi terdeteksi selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan perkebunan tersebut adalah IJM Corporation, Genting dan PT Sumber Tani Agung Resources.

SMB Kenzai [dimiliki](#) oleh tiga perusahaan induk: Sumitomo Corporation (36,25 persen), Mitsui & Co. Ltd (36,25 persen) dan Marubeni Corporation (27,5 persen). [Kegiatannya](#) meliputi impor/ekspor, perumahan, jasa dan penjualan. PT SMB Gobel Indonesia dan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah dua perusahaan terafiliasi dengan SMB Kenzai yang menjalankan usaha di Indonesia. SMB Kenzai menaati persyaratan dalam kebijakan lingkungan hidup Sumitomo, yang mewajibkan kepatuhan hukum untuk produk kayu yang ditangani grup tersebut. Karena seluruh kegiatan kedua perusahaan tersebut tidak tercakup oleh komitmen NDPE, maka SMB Kenzai terekspos pada risiko yang sama dengan Sumitomo. SMB Kenzai melakukan pembelian dari sembilan di antara 10 grup pemasok terbesar kayu lapis Indonesia dari bulan September 2018 sampai September 2020 (lihat Gambar 10), di mana banyak di antaranya melakukan deforestasi di dalam areal konsesi perkebunan kelapa sawitnya. Lima dari ke-26 pemasok kayu lapisnya juga mengoperasikan perkebunan kelapa sawit yang belum tercakup oleh komitmen NDPE.

Daiken Corporation mengimpor 56.330 MT kayu lapis di Jepang dari bulan September 2018 sampai September 2020. Perusahaan tersebut, yang [terdaftar](#) di Bursa Efek Tokyo, berspesialisasi di bidang produksi berbagai produk bahan dan mebel kayu untuk perumahan dan konstruksi. [Pemegang saham](#) terbesar di Daiken adalah ITOCHU Corporation (35 persen). Perusahaan tersebut melakukan kegiatan di

Indonesia melalui PT Daiken Dharma Indonesia yang menjadi pusat produksi dan kantor perwakilan. Dua pemasok kayu lapis Daiken menanam kelapa sawit di Indonesia dan tidak mempunyai kebijakan NDPE.

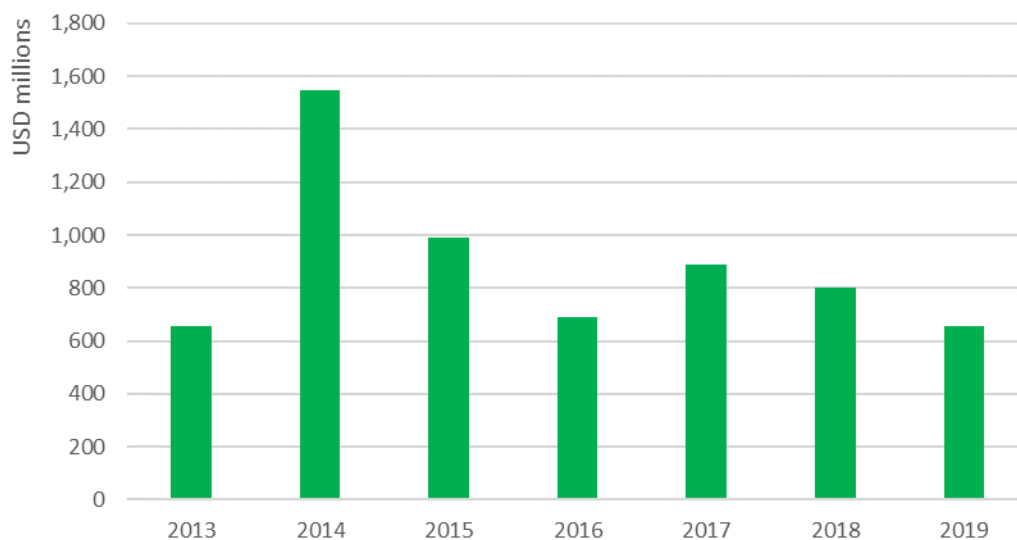
Japan Kenzai, yang memproduksi bahan bangunan, dimiliki oleh JK Holdings dan terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Di Indonesia, Japan Kenzai mempunyai satu kantor perwakilan dan satu anak perusahaan. Japan Kenzai melakukan pembelian dari tujuh di antara 10 eksportir kayu lapis terbesar di Indonesia. Dari 18 perusahaan pemasoknya, tiga di antaranya tidak tercakup oleh komitmen NDPE.

Jepang adalah pemodal terbesar keempat untuk sektor perkelapasawitan di Asia Tenggara

Lembaga keuangan Jepang menyediakan pembiayaan sebesar \$AS 6,2 miliar untuk sektor perkelapasawitan di Asia Tenggara

Dari tahun 2013 sampai 2019, lembaga keuangan Jepang menyediakan 11 persen dari total pembiayaan yang teridentifikasi untuk perusahaan yang bergerak di sektor perkelapasawitan di Asia Tenggara. Dalam bentuk pinjaman dan layanan penjaminan emisi, lembaga keuangan Jepang menyediakan pembiayaan sebesar \$AS 6,2 miliar kepada sektor perkelapasawitan. Jepang menjadi pemodal terbesar keempat menyusul Malaysia, Indonesia dan Singapura.

Gambar 12: Pinjaman dan penjaminan emisi untuk kelapa sawit di Asia Tenggara dari lembaga keuangan Jepang



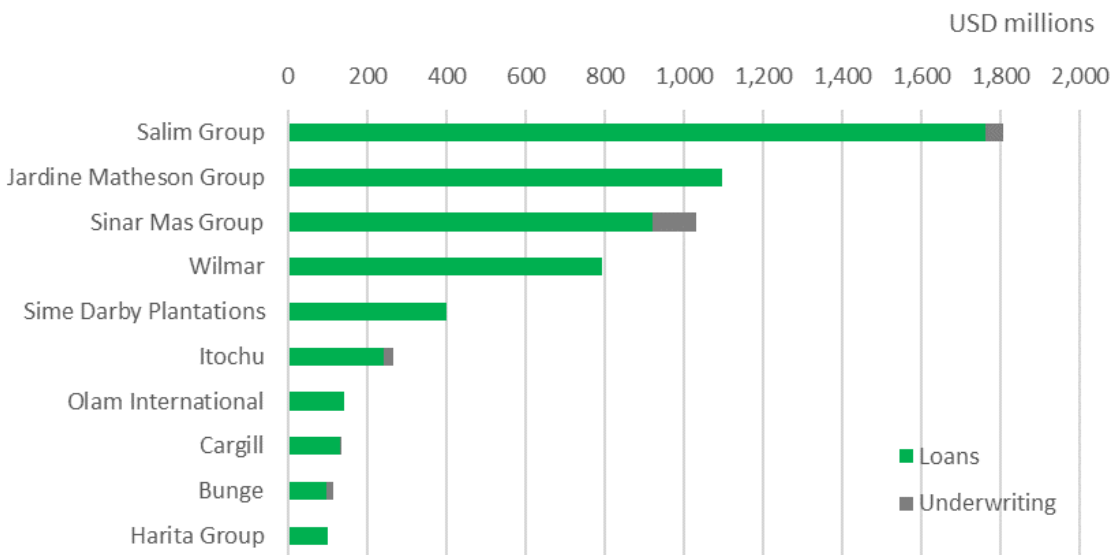
Catatan: Setiap jumlah disesuaikan pada nilai minyak sawit yang dapat dikenakan. Sumber: [Forests & Finance](#) (2020).

Rata-rata pembiayaan tahunan yang disediakan oleh lembaga keuangan Jepang mencapai \$AS 890 juta dari tahun 2013 sampai 2019, sedangkan kenaikan angka pada tahun 2014 merupakan akibat dari pembiayaan sebesar \$AS 405 juta yang diberikan oleh Mitsubishi UFJ Financial dan Mizuho Financial kepada Sime Darby untuk proses akuisisi New Britain Palm Oil Limited (NBPOL).

Dari total pembiayaan yang teridentifikasi dari lembaga keuangan Jepang, 96 persen berasal dari Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial dan SMBC Group. Dari tahun 2013 sampai 2019, ketiga lembaga keuangan ini menyediakan pinjaman dan layanan penjaminan emisi masing-masing sebesar \$AS 2,3 miliar, \$AS 2,0 miliar, dan \$AS 1,7 miliar kepada sektor perkelapasawitan Asia Tenggara.

Dari total pembiayaan yang teridentifikasi, Salim Group menerima pembiayaan terbesar dari lembaga keuangan Jepang dengan total nilai sebesar \$AS 1,8 miliar dari tahun 2013-2019. Salim Group menjadi satu-satunya eksportir besar minyak sawit Indonesia yang menerima pembiayaan dalam jumlah besar. Selama periode yang sama, Jardine Matheson Group dan Sinar Mas Group menerima pembiayaan masing-masing sebesar \$AS 1,1 miliar dan \$AS 1,0 miliar. Di samping Salim Group, Wilmar International yang menerima pembiayaan sebesar \$AS 792 juta dan ITOCHU Corporation sebesar \$AS 265 juta termasuk dalam daftar 10 klien terbesar untuk pemodal Jepang. Meskipun sudah mempunyai [kebijakan NDPE](#), Salim Group masih ada berbagai [kekurangan](#) dalam penerapannya.

Gambar 13: Sepuluh klien terbesar lembaga keuangan Jepang (2013-2019)



Catatan: Setiap jumlah disesuaikan pada nilai minyak sawit yang dapat dikenakan. Sumber: [Forests & Finance](#) (2020).

Perusahaan dagang Fuji Oil dan perusahaan hilir Kao Corporation menerima pembiayaan masing-masing sebesar \$AS 265 juta dan \$AS 548 juta dari lembaga keuangan Jepang. Royal Golden Eagle Group (RGE), sebagai eksportir terbesar minyak sawit dari Indonesia ke Jepang, menerima sebesar \$AS 161 juta dari lembaga Jepang. Jumlah tersebut baru mencapai dua persen saja dari total pembiayaan senilai \$AS 7,1 miliar yang teridentifikasi dan diterima oleh RGE. Data keuangan dari dua grup industri besar di Jepang, yakni Mitsui dan Mitsubishi, tidak dimasukkan karena kegiatan perkelapasawitan hanya merupakan porsi kecil dari kegiatan usahanya. Hubungan keuangan antara perusahaan lain yang dibahas dalam laporan ini dan lembaga keuangan Jepang tidak teridentifikasi oleh basis data Forests & Finance.

Gambar 14: Beberapa eksportir/importir minyak sawit dengan pembiayaan yang teridentifikasi dari Jepang (2013-2019, \$AS juta)

Grup	Bank	Pinjaman	Penjaminan Emisi	Total
Eksportir & Pemasok Salim Group	Mizuho Financial	678	46	724
	SMBC Group	676		676
	Mitsubishi UFJ Financial	406		406
Total Salim Group		1.761	46	1.807

Grup	Bank	Pinjaman	Penjaminan Emisi	Total
Wilmar	Mitsubishi UFJ Financial	288		288
	SMBC Group	221		221
	Mizuho Financial	218		218
	Sumitomo Mitsui Trust	37		37
	Lainnya	27		27
Total Wilmar		792		792
Royal Golden Eagle Group	Mitsubishi UFJ Financial	139		139
	Tokyo Star Bank	11		11
	Development Bank of Japan	11		11
Total Royal Golden Eagle Group*		161		161
PT Sungai Budi Group (PT Tunas Baru Lampung)	Mizuho Financial	10		10
Importir Itochu - Fuji Oil	SMBC Group	63	3	66
	Norinchukin Bank	40		40
	Sumitomo Mitsui Trust	40		40
	Nippon Life Insurance	40		40
	Mizuho Financial	31	3	34
	Mitsubishi UFJ Financial	14	3	16
	Lainnya	14	14	29
	Total Itochu - Fuji Oil		242	23
Kao Corporation*	Mizuho Financial	118	14	132
	Daiwa Securities		122	122
	Mitsubishi UFJ Financial	90	5	95
	Resona Holdings	90		90
	Sumitomo Mitsui Trust	59		59
	Nomura		36	36
	SMBC Group		14	14
Total Kao		358	190	548

Catatan: Setiap jumlah disesuaikan pada nilai minyak sawit yang dapat dikenakan, kecuali untuk Royal Golden Eagle Group dan Kao (*) di mana jumlah pembiayaan berlaku untuk keseluruhan grup. Sumber: [Forests & Finance](#) (2020). Chain Reaction Research (2020).

Pemodal Jepang di sektor perkelapasawitan juga membiayai perusahaan yang aktif di sektor kayu

Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial dan SMBC Group juga termasuk dalam lima lembaga keuangan terbesar di Jepang yang membiayai produsen kayu untuk sektor konstruksi. Lembaga tersebut menyediakan 63 persen dari total pembiayaan. Dari total nilai pinjaman dan layanan penjaminan emisi sebesar \$AS 2,3 miliar yang teridentifikasi dari lembaga keuangan Jepang, Mizuho menyediakan 29 persen (\$AS 662 juta), Mitsubishi UFJ menyediakan 18 persen (\$AS 400 juta) dan SMBC Group menyediakan 16 persen (\$AS 361 juta).

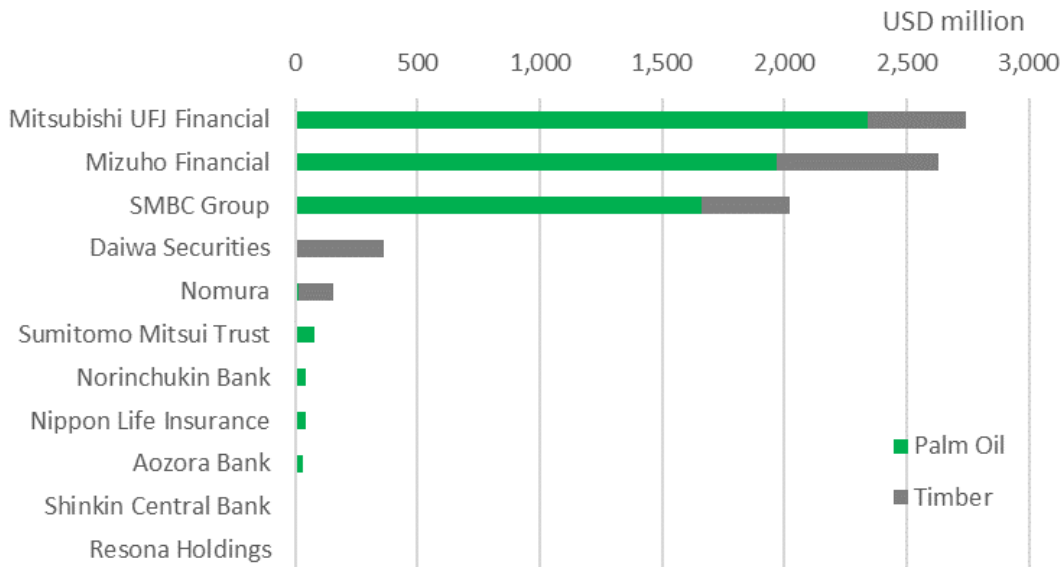
Gambar 15: Beberapa eksportir / importir dengan pembiayaan yang teridentifikasi dari lembaga keuangan Jepang (\$AS x juta)

Group	Bank	Pinjaman	Penjaminan emisi	Total
Eksportir & Pemasok				
Harita Group	SMBC Group	91		91
	Mitsubishi UFJ Financial	9		9
Total Harita Group		100		100
Importir				
Itochu	Mizuho Financial	247	6	253
	SMBC Group	188	5	193
	Mitsubishi UFJ Financial	55	6	61
	Lainnya	22	11	33
Total Itochu		512	28	540
Sumitomo Forestry	Daiwa Securities		350	350
	Nomura		124	124
	SMBC Group	35	78	114
	Sumitomo Mitsui Trust	35		35
	Mizuho Financial	35		35
	Mitsubishi UFJ Financial	25		25
	Lainnya	246		246
Total Sumitomo Forestry		376	552	928

Catatan: Jumlah untuk Sumitomo Forestry dan Itochu disesuaikan pada nilai kayu yang dapat dikenakan, sedangkan untuk Harita Group (*) jumlah pembiayaan berlaku untuk keseluruhan grup. Sumber: [Forests & Finance \(2020\)](#).

Total nilai pembiayaan yang diberikan kepada sektor perkelapasawitan dan kayu oleh Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial dan SMBC Group mencapai \$AS 7,4 miliar dari tahun 2013 sampai 2019. Menyusul tiga bank di peringkat atas tersebut, Daiwa Securities dan Nomura masing-masing menyediakan \$AS 364 juta dan \$AS 155 juta kepada sektor kayu selama periode yang sama.

Gambar 16: Sepuluh kreditor terbesar Jepang untuk kelapa sawit dan kayu (2013-2019)



Catatan: Setiap jumlah disesuaikan pada nilai minyak sawit yang dapat dikenakan. Sumber: [Forests & Finance](#) (2020).

Kebijakan untuk sektor komoditas berisiko hutan dari Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial dan SMBC Group masih kurang memadai

Berdasarkan penilaian oleh Forests & Finance, standar lingkungan hidup di ketiga lembaga keuangan ini masih lemah meskipun telah mengumumkan kebijakan untuk sektor komoditas berisiko hutan.

Mitsubishi UFJ Financial (MUFJ): Bank ini diberi skor 18 dari 50 di penilaian kebijakan oleh [Forests & Finance](#), karena kebijakannya dinilai “buruk” dalam melarang deforestasi oleh kliennya kecuali di areal Nilai Konservasi Tinggi. Mengenai [kebijakan](#) sektor perkelapasawitannya, MUFJ menyatakan bahwa para klien dianjurkan untuk menjadi anggota RSPO, dan perusahaan tersebut meminta kliennya untuk mengajukan rencana aksi untuk meraih sertifikasi apabila kegiatannya belum bersertifikasi.

Mizuho Financial: Bank ini diberi skor 16 dari 50 di penilaian kebijakan oleh [Forests & Finance](#), karena tidak mempunyai kebijakan yang melarang pelanggaran standar lingkungan hidup oleh kliennya. [Kebijakan](#) sektor kelapa sawit dan kayunya menyatakan bahwa bank ini memperhatikan apakah klien/proyek telah menerima sertifikasi untuk produksi minyak sawit berkelanjutan atau apakah mereka sudah tersertifikasi atas pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

SMBC Group: SMBC Group diberi skor 22 dari 50 di penilaian kebijakan oleh [Forests & Finance](#), karena standar lingkungan hidupnya dinilai lumayan. [Kebijakan](#) sektor kelapa sawit bank ini menyatakan bahwa dukungan hanya diberikan setelah sertifikasi oleh RSPO atau badan sertifikasi serupa sudah dikonfirmasi. Kebijakannya juga mewajibkan perlindungan terhadap sumber daya hutan dalam pengembangan perkebunan baru dan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti mempekerjakan anak di bawah umur. Terkait deforestasi, hanya deforestasi ilegal saja yang disinggung, sedangkan untuk proyek berskala besar, dampak lingkungannya dinilai berdasarkan [Equator Principles](#) sebagai pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman.

Kao Corporation dan Fuji Oil terekspos pada risiko reputasi oleh pembelian minyak sawitnya

Berdasarkan informasi CDP tahun 2019, pembelian minyak sawit Kao Corporation dan Fuji Oil Holdings berkisar dari 11-20 persen dari total pengadaan masing-masing perusahaan, sehingga investornya terekspos pada risiko keuangan apabila terjadi peristiwa yang merusak reputasi.

Kao Corporation memperkirakan bahwa risiko reputasi dan pasar yang timbul dari rantai pasokan minyak sawitnya dapat berdampak keuangan sebesar **JPY 70 miliar** (sekitar \$AS 642,2 juta). Kao menganggap bahwa semacam peristiwa tersebut sangat mungkin terjadi. Biaya yang diungkap oleh Kao untuk menangani risiko keuangan ini adalah sebesar JPY 3,6 juta (sekitar \$AS 33.000), sama dengan 10 persen gaji tiga karyawan per tahun sebagai biaya untuk kerja penanggulangan. Namun, sebagian besar biaya tanggapan bisa saja sudah tercakup dalam biaya pengadaan minyak sawit Kao karena biaya minyak sawit (dan produk turunannya) mencapai \$AS 2.700 per ton metrik (dikalkulasi berdasarkan informasi di [Pengungkapan CDP](#) untuk tahun 2019). Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar rata-rata tahun 2019 yang sebesar \$AS 600 per ton metrik.

Fuji Oil Holdings memperkirakan risiko dampak keuangan sebesar **JPY 6,75 miliar** (sekitar \$AS 61,9 juta) apabila peristiwa yang merusak reputasi terjadi berkaitan dengan rantai pasokan minyak sawitnya. Fuji Oil melaporkan JPY 40 juta (sekitar \$AS 0,4 juta) sebagai biaya tanggapan. Angka ini meliputi 1) biaya program bersama dengan LSM; 2) biaya untuk pengumpulan informasi oleh perusahaan konsultan eksternal; dan 3) biaya untuk mempromosikan kebijakan pengadaan minyak sawit berkelanjutan, seperti kegiatan perbaikan rantai pasokan dan “*engagement*” dengan para pemasok. Berbeda dengan Kao, kalkulasi biaya minyak sawit oleh Fuji Oil untuk tahun 2019 adalah sebesar \$AS 539 per ton metrik, atau lebih rendah dari harga pasar rata-rata.

Gambar 17: Pengungkapan CDP dari Kao dan Fuji Oil tentang minyak sawit tahun 2019

Pengungkapan CDP tahun 2019	Kao Corporation	Fuji Oil Holdings
Ton minyak sawit, minyak inti sawit, produk turunan yang dibeli	446.000	776.000
Biaya pembelian minyak sawit / total pengadaan	11-20%	11-20%
Persentase penghasilan yang tergantung pada minyak sawit	81-90%	21-30%
Estimasi potensi risiko keuangan terkait minyak sawit (\$AS juta)	642,2	61,9
Biaya tanggapan (\$AS x juta)	0,03	0,4
Biaya tanggapan (\$AS/ton)	0,07	0,5

Sumber: Pengungkapan [CDP Hutan](#)

Risiko reputasi dapat diminimalkan dengan acuan biaya eksekusi sebesar \$AS 65/MT

Para pemodal dapat fokus pada “*engagement*” mengenai pengeluaran tambahan untuk kegiatan pengawasan/verifikasi guna menghindari penurunan nilai reputasi di Kao dan Fuji Oil. Berdasarkan acuan biaya eksekusi minyak sawit sebesar \$AS 65 per MT dan analisis rantai nilai dari [laporan](#) CRR yang terbit pada bulan Juli 2020, maka acuan pengeluaran eksekusi kebijakan kelapa sawit sebagai persentase dari nilai konsumen produk minyak sawit adalah 0,18 persen untuk Kao dan 3,04 persen untuk Fuji Oil.

Untuk produk Kao, biaya tambahan yang relatif kecil dengan mudah dapat ditambahkan pada harga ritel dan konsumen. Untuk Fuji Oil, yaitu usaha B2B dengan margin yang relatif lebih rendah, para konsumennya akan perlu menaikkan harga produk sebesar sekitar 3 persen untuk menutup biaya eksekusi tambahan. Mengingat margin tinggi yang melekat di basis konsumen FMCG, ritel dan restoran Fuji Oil, terutama dalam hubungan rantai pasokannya dengan Mars melalui UniFuji, maka biaya tambahan tersebut dapat disebarakan di kedua tahap berikutnya di rantai nilai.

Gambar 18: Analisis rantai nilai untuk Kao dan Fuji Oil

2019	Kao Produk terkait minyak sawit	Fuji Oil Produk terkait minyak sawit
Ton minyak sawit, minyak inti sawit, produk turunan	446.000	776.000
Total biaya pembelian minyak sawit (\$AS x juta) ¹	1.207	418
Biaya per ton (\$AS)	2.706	539
Acuan biaya eksekusi minyak sawit per ton (\$AS)	65	65
Acuan pengeluaran eksekusi kebijakan kelapa sawit (\$AS x juta)	29	50
Rantai nilai (\$AS x juta):		
Bahan baku sebagai % biaya penjualan ²	71,0%	71,0%
Biaya bahan baku	4.627	575
Biaya penjualan (CoS) ³	6.517	809
CoS/penghasilan neto	56,5%	80,4%
Laba kotor	1.799	197
Rasio penghasilan neto/bahan baku (X)	2,5	1,8
Penghasilan neto berkaitan dengan minyak sawit ³	11.535	1.006
Ritel/nilai di swalayan tidak termasuk PPN ⁴	14.419	1.510
Harga konsumen termasuk PPN ⁵	15.861	1.661
Acuan biaya eksekusi minyak sawit sebagai % penghasilan neto	0,25%	5,01%
Acuan biaya eksekusi minyak sawit sebagai % nilai ritel	0,20%	3,34%
Acuan biaya eksekusi minyak sawit sebagai % nilai konsumen	0,18%	3,04%

Sumber: Chain Reaction Research, ¹CDP 2020, titik tengah kisaran 11-20% total pengadaan², Laporan Tahunan Unilever 2019³, laporan tahunan untuk total perusahaan, dan CDP untuk penjualan terkait minyak sawit⁴, dengan asumsi margin bruto swalayan/eceran sebesar 20% untuk Kao, dan margin bruto sebesar 50% untuk FMCG Fuji Oil⁵, dengan asumsi PPN sebesar 9% untuk makanan.

Kao dan Fuji Oil mungkin mengabaikan risiko keuangan, para investor mempunyai ruang untuk melakukan “engagement”

Baik Kao Corporation maupun Fuji Oil Holdings mendasarkan estimasi dampak keuangannya pada potensi kehilangan penghasilan dari sebagian konsumennya apabila terjadi peristiwa yang merusak reputasinya. Kao memperkirakan bahwa separuh total penghasilannya dapat terdampak dan 10 persen konsumennya dapat mengubah perilaku pembeliannya selama periode satu tahun, sehingga membahayakan sekitar 5 persen penghasilannya. Sementara itu, Fuji Oil berasumsi bahwa 10 persen total penjualan dapat terdampak selama enam bulan dari 45 persen kliennya, sehingga membahayakan sekitar 2 persen total penghasilannya. Bagi para investor, risiko akses pasar ini merupakan risiko langsung terhadap nilai investasinya. Dengan mengisolasi dampak dari penghasilan yang hilang terhadap valuasi perusahaan, maka nilai saham Kao dan Fuji Oil dapat menurun masing-masing sebesar 5,2 dan 2,4 persen, dengan asumsi bahwa tingkat margin labanya tetap sama, dan menggunakan valuasi pengganda nilai saat ini.

Namun demikian, [kajian CRR](#) pada bulan Mei 2019 mengenai penilaian risiko reputasi menunjukkan bahwa peristiwa yang merusak reputasi dapat berdampak jauh lebih negatif terhadap valuasi perusahaan dibanding hilangnya penghasilan. Metodologi dari kajian tersebut mengisyaratkan bahwa dampak dari peristiwa seperti itu terhadap valuasi perusahaan dapat berkisar dari 20 persen dampak positif sampai 29 persen dampak negatif, tergantung pada tingkat keberhasilan (atau ketidakberhasilan) dari tanggapan. Apabila diterapkan pada Kao Corporation dan Fuji Oil Holdings, maka nilai yang berisiko dari reputasi masing-masing bisa setinggi \$AS 9,6 miliar dan \$AS 0,75 miliar bagi para investornya.

Berdasarkan laporan terbaru, 41 persen saham Fuji Oil Holdings dimiliki ITOCHU dan anak perusahaannya, sementara Sumitomo Mitsui Trust dan JA Group masing-masing memiliki 4 persen dan 3 persen saham Fuji Oil, senilai \$AS 96 juta dan \$AS 83 juta. Walaupun banyak lembaga internasional seperti Vanguard, Schrodgers dan BlackRock juga berinvestasi di Fuji Oil, terdapat lebih banyak ruang bagi para investor untuk melakukan “engagement” dengan perusahaan pemegang kendali, yakni ITOCHU Corporation. Menurut [situs web](#) ITOCHU, investor asing memiliki 35 persen saham perusahaan tersebut.

Kao Corporation tidak mempunyai perusahaan induk dan investor asing memiliki 44,4 persen saham perusahaan tersebut. Di peringkat atas daftar investor, bank Jepang, Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Trust dan Nomura menjadi tiga investor terbesar, dengan nilai masing-masing sebesar \$AS 2,5 miliar, \$AS 2,4 miliar dan \$AS 2,0 miliar.

Gambar 19: Dua puluh pemegang saham terbesar di Kao Corporation dan Fuji Oil Holdings (\$AS x juta)

Grup Investasi – Kao Corp.	\$AS x juta	Grup Investasi – Fuji Oil	\$AS x juta
Mitsubishi UFJ Financial	2.478	ITOCHU	1.123
Sumitomo Mitsui Trust	2.414	Sumitomo Mitsui Trust	96
Nomura	1.966	JA Group	83
Mizuho Financial	1.895	Nomura	47
Sun Life Financial	1.129	Tokio Marine Holdings	46
BlackRock	1.085	SMBC Group	35
Vanguard	973	Nippon Life Insurance	35

Grup Investasi – Kao Corp.	\$AS x juta	Grup Investasi – Fuji Oil	\$AS x juta
Daiwa Securities	952	Vanguard	34
Lindsell Train	584	Franklin Resources	28
Nippon Life Insurance	545	Schroders	26
Government Pension Fund Global	526	BlackRock	24
Fidelity Investments	502	Daiwa Securities	20
JP Morgan Chase	391	Government Pension Fund Global	17
Pendal Group	301	Dimensional Fund Advisors	9
CalPERS	265	Mitsubishi UFJ Financial	8
SPARX	187	Kamigumi	8
TIAA	182	Marathon Asset Management (UK)	6
Bank of New York Mellon	163	J-Oil Mills	5
Baillie Gifford	162	Mizuho Financial	4
Power Financial Corporation	150	BNP Paribas	4

Sumber: Refinitiv (dilihat pada bulan Maret 2021), kalkulasi Profundo.

Sanggahan:

Laporan ini dan informasi yang teruat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (msl., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.